



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Jl. Palatehan I No. 27 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12110, Telp. 021- 27510964 Fax. 021-7220050

NOTA DINAS

No. 301/ND/Pg/2020

Kepada Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Dari : Direktur Utama BLU PPDPP
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2019
Tanggal : 28 Januari 2020

Dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PU PR, bersama ini disampaikan Laporan Kinerja BLU PPDPP Tahun 2019.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Direktur Utama,

Arief Sabaruddin
NIP. 196511301990031001



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN



2019

LAPORAN KINERJA

PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

KATA PENGANTAR

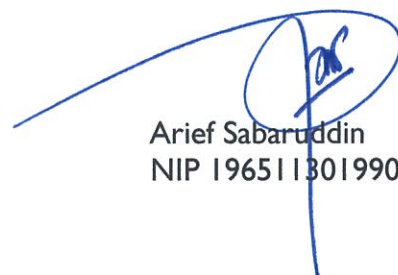
Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU-PPDPP) merupakan salah satu unit kerja yang berada dalam koordinasi Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebagai salah satu unit kerja instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab publik, BLU-PPDPP mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini merupakan bukti komitmen dalam mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah.

Dalam laporan ini akan diperoleh informasi mengenai Penetapan Kinerja berikut sasaran kegiatan yang telah berhasil dicapai dan Kinerja kegiatan yang ada. Dalam waktu berjalan terdapat berbagai perubahan yang mempunyai pencapaian kinerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yang dipengaruhi oleh perkembangan kondisi dan situasi yang dihadapi dan kebijakan-kebijakan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan kinerja ini disusun dengan mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran BLU-PPDPP.

Laporan kinerja PPDPP Tahun 2019 ini juga diharapkan menjadi masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2019.

Jakarta, Januari 2020
Direktur Utama,



Arief Sabaruddin
NIP 196511301990031001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka laporan kinerja ini akan diperoleh informasi mengenai kinerja kegiatan yang telah berhasil dicapai PPDPP selama tahun 2019. Penetapan Kinerja berikut sasaran dan indikator kinerjanya sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif atas pencapaian sasaran kegiatan yang ada. Walaupun seiring berjalannya waktu terdapat berbagai perubahan yang mempengaruhi pencapaian kinerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dimanahal tersebut sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dari Kementerian Keuangan dan Pimpinan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam rangka implementasi arah kebijakan investasi Pemerintah dalam tahun anggaran 2019 dianggarkan investasi untuk bantuan pembiayaan perumahan melalui dana bergulir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 68.858 unit rumah. Untuk memenuhi target tersebut Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019, dialokasikan tambahan dana FLPP sejumlah Rp. 5.200.000.000.000,-. Hal tersebut tertuang dalam DIPA BA.999.03 dengan nomor: SP DIPA-999.03.1.984532/2019 yang telah ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2019 dan direvisi pada tanggal 02 April 2019.

Realisasi penyaluran dana FLPP sampai dengan Bulan Desember 2019 sejumlah 77.835 unit atau telah mencapai 113,04% dari target sejumlah 68.858 unit dengan nilai FLPP sebesar Rp. 7.545.288.389.505,- yang terdiri dari Anggaran DIPA BA 999.03 sebesar Rp 5.200.000.000.000 dan Proyeksi Pengembalian Pokok sebesar Rp. 2.382.312.000.000,- atau mencapai 106,27% dari target sebesar Rp. 7.100.000.000.000,-. Angka realisasi ini tidak termasuk penyaluran KPR Sejahtera yang bersumber dari dana talangan bank pelaksana sebanyak 14.580 unit dengan nilai Rp. 1.458.000.000.000,-. Jumlah pembiayaan penyaluran KPR Sejahtera FLPP tahun 2019 dimaksud berasal dari saldo awal dana FLPP tahun 2019 sebesar Rp. 391.000.000.000,-, DIPA FLPP tahun 2019 sebesar Rp. 5.200.000.000.000,- dan pengembalian pokok FLPP yang diterima selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019 sebesar Rp. 2.604.000.000.000,-.

Sampai dengan bulan Desember 2019 Bank Pelaksana yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) bank pelaksana yang terdiri dari 7 (tujuh) Bank Umum Nasional Konvensional, 2 (dua) Bank Umum Nasional Syariah, 18 (delapan belas) Bank Pembangunan Daerah Konvensional, dan 12 (dua belas) Bank Pembangunan Daerah Syariah.

Kinerja capaian penyaluran dana FLPP sampai dengan bulan Desember 2019 sejumlah 77.835 unit atau mencapai 113,04% dari target sejumlah 68.858 unit dan dengan nilai FLPP sebesar Rp. 7.545.288.389.505,- atau mencapai 106,27% dari target sebesar Rp. 7.100.000.000.000,-. Akumulasi secara total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 sebanyak 655.602 unit dengan nilai FLPP sebesar Rp.

44.366.000.000.000,-. Angka realisasi ini tidak termasuk penyaluran KPR Sejahtera yang bersumber dari dana talangan bank pelaksana sebanyak 14.580 unit dengan nilai Rp 1.458.000.000.000,-.

Untuk mendukung operasionalisasi program FLPP, pembiayaan operasional layanan dilakukan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari tarif dan pengelolaan dana. Realisasi penerimaan total PNBP di tahun 2019 hingga bulan Desember adalah sebesar Rp 319.000.000.000,- atau mencapai 129,93% dari target penerimaan PNBP tahun 2018 sebesar Rp 246.000.000.000,-. Akumulasi secara total penerimaan PNBP dari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 sebesar Rp 1.913.000.000.000,-. Sementara untuk realisasi belanja operasional dengan pembiayaan yang bersumber dari BA.033.08 tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 sebesar Rp 66.420.000.000,- atau mencapai 98,05% dari anggaran biaya operasional tahun 2019 sebesar Rp 67.750.000.000,-.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	lx
BAB I. PENDAHULUAN	I
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Fungsi.....	2
1.2.1. Kedudukan	2
1.2.2. Tugas	2
1.2.3. Fungsi.....	3
1.3. Struktur Organisasi	3
1.4. Isu Strategis PPDPP.....	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Uraian Singkat Renstra	11
2.1.1. Kondisi Umum	11
2.1.2. Visi dan Misi	12
2.1.3. Kegiatan-kegiatan Strategis.....	16
2.2. Perjanjian Kinerja.....	16
2.3. Metode Pengukuran	19
2.4. Target Tahun ini Menurut Rencana Strategis Bisnis	21
BAB III. KAPASITAS ORGANISASI	23
3.1. Sumber Daya Manusia Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan.....	23
3.2. Sarana Prasarana	26
3.3. DIPA Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	31
3.4. Potensi dan Hambatan	32
BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA	33
4.1. Capaian Kinerja Organisasi	33
4.2. Perbandingan Kinerja Organisasi.....	42
4.3. Realisasi Anggaran Tahun 2019	46
4.4. Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2015-2019.....	50
4.5. Evaluasi Pencapaian Kinerja Keuangan.....	55
BAB V PENUTUP	69

DAFTAR LAMPIRAN.

-PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019.

DAFTAR TABEL.

	Halaman
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (BA.033.08)	17
Tabel 2.2. Perjanjian Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok (BA.033.03)	18
Tane 2.3. Kontrak Kinerja Dirjen Perbendaharaan (BA.999.03).....	19
Tabel 3.1. Jumlah Pegawai PPDPP Menurut Jabatan.....	23
Tabel 3.2. Jumlah Pegawai PPDPP Menurut Status Kepegawaian	24
Tabel 3.3. Jumlah Pegawai PPDPP Menurut Pendidikan.....	25
Tabel 3.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Interval Usia	25
Tabel 3.5. Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Kementerian.....	25
Tabel 3.6. Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Rincian per Sub-sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2019	27
Tabel 4.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	34
Tabel 4.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	35
Tabel 4.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	36
Tabel 4.4. Capaian Kinerja Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok .	39
Tabel 4.5. Capaian Program Kinerja Tahun 2019	41
Tabel 4.6. Kinerja Tahun 2019 – 2018 Untuk Program Investasi Pemerintah (BA.999.03)Pengembalian Pokok	43
Tabel 4.7. Perbandingan Kinerja Tahun 2019 – 2018 untuk Operasional Pengembalian Pokok	43
Tabel 4.8. Rincian Pendapatan Tahun 2019 dan 2018.....	45
Tabel 4.9. Perkembangan Pengelolaan Dana s.d 31 Desember 2019.....	45
Tabel 4.10. Realisasi Anggaran Operasional PPDPP Tahun 2019 (BA.033).....	46
Tabel 4.11. Realisasi Anggaran Dana Investasi PPDPP Tahun 2019 (BA.033)	48
Tabel 4.12. Realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) berdasarkan Bank Pelaksana Tahun 2018.....	49
Tabel 4.13. Kinerja Dukungan Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2015-2019.....	51
Tabel 4.14. Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok Tahun 2015-2019.....	53
Tabel 4.15. Realisasi Anggaran Operasional PPDPP Tahun 2015-2019.....	56
Tabel 4.16. Realisasi Anggaran Dana Investasi PPDPP Tahun 2015-2019.....	61
Tabel 4.17. Analisis Pencapaian Kinerja dan Keuangan BLU PPDPP Tahun 2015-2019....	64

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 4.1. Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2019 berdasarkan Target dan Realisasi	39
Grafik 4.2. Realisasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2019 Per Bulan	40

DAFTAR GAMBAR.

Halaman

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi PPDPP (Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan).....	4
Gambar 4.1.	Persentase Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun Tahun 2015-2019.....	53
Gambar 4.2.	Persentase Kinerja Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok Tahun 2015-2019.....	54
Gambar 4.3.	Target, Realisasi dan Persentase Kinerja Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok Tahun 2015-2019.....	54
Gambar 4.4.	Persentase Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2015-2019.....	59
Gambar 4.5.	Persentase Realisasi Anggaran Dana Investasi PPDPP Tahun 2015-2019.....	62
Gambar 4.6.	Target, Realisasi dan Persentase Kinerja Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok Tahun 2015-2019.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG.

Akuntabilitas telah menjadi perhatian utama dan menjadi tuntutan masyarakat yang semakin peduli serta semakin kritis terhadap pola penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini membawa konsekuensi terhadap strategi-strategi yang harus dijalankan atau dilaksanakan oleh pemerintah. Hal mengenai akuntabilitas tak lepas dari isu-isu tentang aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa kembali menggema pada beberapa waktu belakangan ini. Berkembangnya persoalan akuntabilitas ini pada umumnya disebabkan oleh belum berjalannya mekanisme manajemen sektor publik yang baik di lingkungan instansi pemerintah. Disamping itu, belum sempurnanya implementasi aturan-aturan yang memberikan penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) bagi aparatur pemerintah menjadikan manajemen sektor publik selalu menjadi sorotan.

Untuk itu, guna mewujudkan pemerintahan yang handal, profesional dan bertanggung jawab diperlukan upaya yang komprehensif dari setiap unsur penyelenggara negara dalam menjalankan berbagai tugas dan fungsinya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menyediakan Laporan Kinerja di setiap akhir tahun anggaran sebagai bukti penilaian atas kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Berbagai informasi yang terdapat dalam Laporan Kinerja dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab publik setiap instansi pemerintah karena di dalamnya memuat rencana strategis, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, capaian kinerja pada tahun yang bersangkutan dan akuntabilitas keuangan. Semua informasi tersebut dapat diakses publik sehingga masyarakat umum dapat mengetahui dan menilai kinerja yang telah dilakukan oleh suatu instansi pemerintah dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih, amanah dan akuntabel.

Laporan Kinerja memberikan informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran sebagai upaya terukur pencapaian misi yang mendukung pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu, Laporan Kinerja juga memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi dan efektivitas

pemanfaatan dana publik terhadap jasa atau produk prima yang dihasilkan (*excellency*) dan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali (*equity*).

Melalui akuntabilitas kinerja akan dapat dinilai kinerja instansi pemerintah baik jangka pendek (tahunan) maupun dalam kaitan tujuan jangka panjangnya. Dengan demikian akan tumbuh suatu kondisi semua organisasi pemerintah dapat merasakan kebutuhan yang mendasar akan informasi kinerja organisasinya melalui mekanisme akuntabilitas kinerja. Tanpa akuntabilitas kinerja dan evaluasinya, tidak mungkin diketahui secara tepat peta permasalahan dan tindakan-tindakan tepat bagaimana yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) merupakan bagian dari salah satu unit kerja pada instansi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk itu, PPDPP wajib menyusun Laporan Kinerja yang memberikan informasi mengenai pencapaian misi sebagai upaya terukur mencapai tujuan dan sasaran yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Kementerian PUPR dan Ditjen Pembiayaan Perumahan serta berpedoman pada Rencana Strategis Bisnis (RSB) Tahun 2015-2019 PPDPP.

I.2. TUGAS DAN FUNGSI.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka kedudukan, tugas, dan fungsi PPDPP sebagaimana diuraikan berikut ini:

I.2.1. Kedudukan.

PPDPP adalah unsur pendukung dalam pelaksanaan program pengembangan pembiayaan perumahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. PPDPP dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Direktur Utama.

I.2.2. Tugas.

PPDPP mempunyai tugas melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan, serta pengembangan strategi bisnis dan pelayanan umum di bidang pengelolaan dana bergulir pembiayaan perumahan.

I.2.3. Fungsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, PPDPP menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelayanan pembiayaan perumahan;
- 2) Pengelolaan keuangan;
- 3) Pengelolaan operasi kegiatan;
- 4) Pengelolaan urusan umum dan hukum;
- 5) Pelaksanaan pengawasan intern; dan

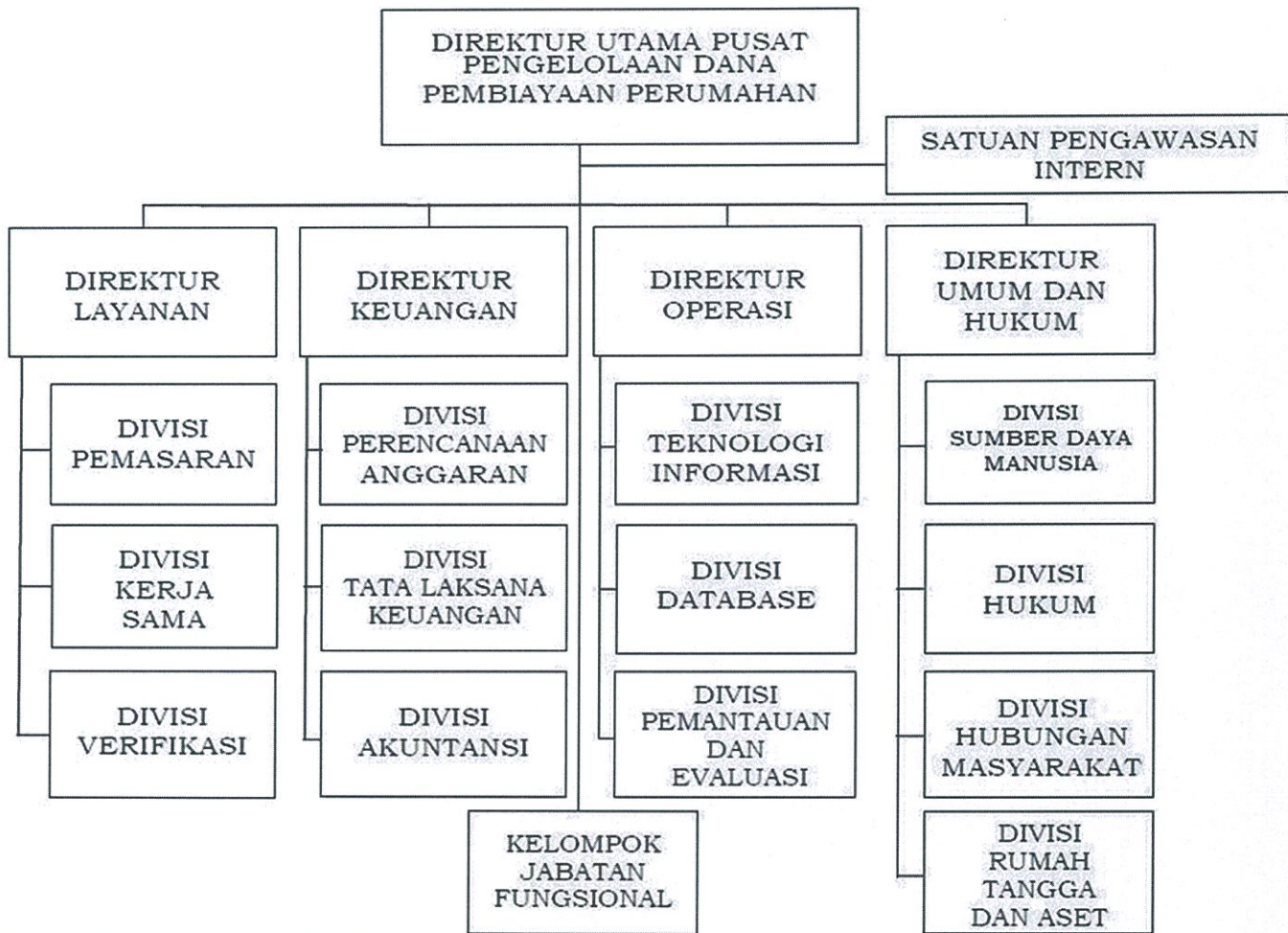
I.3. STRUKTUR ORGANISASI.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2019, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan yang selanjutnya disingkat PPDPP adalah unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. PPDPP mempunyai tugas melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan, serta pengembangan strategi bisnis dan pelayanan umum di bidang pengelolaan dana bergulir pembiayaan perumahan.

BLU-PPDPP adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktur Jenderal Pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Dalam menjalankan organisasinya, BLU-PPDPP dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Direktur Utama. Dalam menjalankan fungsinya PPDPP terdiri atas:

- a. Direktur Utama;
- b. Direktur Layanan;
- c. Direktur Keuangan;
- d. Direktur Operasi;
- e. Direktur Umum dan Hukum; dan
- f. Satuan Pengawasan Intern

Gambar I
Struktur Organisasi BLU PPDPP.



Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2019

A. Uraian Tugas Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan termasuk pelaksanaan RBA, RSB dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya melaporkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Keuangan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, maka Dewan Pengawas memiliki kewajiban:

- 1) Memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan, Menteri Keuangan, dan Pejabat Pengelola BLU mengenai rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran yang disusun oleh Pejabat Pengelola BLU;
- 2) Melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLU dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah dilakukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan paling sedikit 2 (dua) kali sekali dalam 1 (satu) tahun; dan
- 4) Menetapkan setiap keputusan Dewan Pengawas melalui rapat Dewan Pengawas yang diputuskan secara musyawarah untuk mufakat dan bersifat kolektif dan kolegial.

B. Uraian Tugas Pejabat Pengelola Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan.

1) Direktur Utama.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas memimpin Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan dalam pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan pengajuan dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB);
- b. penyiapan dan pengajuan dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
- c. penyiapan dan pengajuan dokumen Standar Pelayanan Minimum (SPM);
- d. koordinasi pelaksanaan RSB dan RBA;
- e. penyusunan rencana kebutuhan, inventarisasi, dan penghapusan aset;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- g. pelaksanaan kerjasama dengan instansi/lembaga;
- h. penyusunan dan penetapan tata kelola internal organisasi;
- i. pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan.

2) Direktur Layanan.

Direktur Layanan mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada lembaga keuangan dan pemangku kepentingan dalam penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Layanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan sosialisasi dan promosi program pembiayaan perumahan;
- b. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi/lembaga dalam hal Direktur Utama berhalangan.
- c. Pelaksanaan verifikasi tagihan pembiayaan perumahan.

Direktur Layanan membawahi :

- a. Divisi Pemasaran;
- b. Divisi Kerjasama; dan
- c. Divisi Verifikasi.

3) *Direktur Keuangan*

Direktur Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan PPDPP. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB);
- b. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan;
- c. Pelaksanaan rekonsiliasi posisi pembiayaan perumahan;
- d. Pembayaran tagihan lembaga keuangan;
- e. Pemantauan pelaksanaan penagihan angsuran;
- f. Pengelolaan dana;
- g. Pelaksanaan pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku;
- h. Penyusunan laporan keuangan.

Direktur Keuangan membawahi :

- a. Divisi Perencanaan dan Anggaran;
- b. Divisi Tata Laksana Keuangan; dan
- c. Divisi Akuntansi.

4) *Direktur Operasi.*

Direktur Operasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi dan pendayagunaan data, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan terhadap ketepatan sasaran pembiayaan perumahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Operasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi;
- b. Pendayagunaan dan pemeliharaan data; dan
- c. Pemantauan dan evaluasi terhadap ketepatan sasaran pembiayaan perumahan

Direktur Operasi terdiri dari:

- a. Divisi Teknologi Informasi;
- b. Divisi Database; dan
- c. Divisi Pemantauan dan Evaluasi.

5) *Direktur Umum dan Hukum.*

Direktur Umum dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, hukum, kehumasan, rumah tangga dan aset. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Umum dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan sumber daya manusia;
- b. Pelaksanaan dukungan bidang hukum dan kepatuhan;
- c. Pelaksanaan kegiatan kehumasan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
- e. Pengelolaan aset.

Direktur Umum dan Hukum membawahi :

- a. Divisi Sumber Daya Manusia;
- b. Divisi Hukum;
- c. Divisi Hubungan Masyarakat ; dan
- d. Divisi Rumah Tangga dan Aset.

Satuan Pengawasan Intern

Satuan Pengawasan Intern mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan PPDPP.

Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Direktur Utama. Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

C. Susunan Pejabat Pengelola PPDPP.

Susunan Pejabat Pengelola PPDPP pada tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri dari :

1) *Direktur Utama :*

- a. Budi Hartono, S.E.,M.M (22 September 2015 - 1 Juni 2019), SK Menteri PUPR No.471/KPTS/M/2015 dan SK No.835/KPTS/M/2019.
- b. Plt. Ir. Monhilal,Dipl. S.E (Juni 2019 - 17 September 2019), SK Menteri PUPR No.919/KPTS/M/2017 dan No.835/KPTS/M/2019.
- c. Prof (R) Dr. Ir. Arief Sabaruddin, CES (1 Oktober 2019 - sekarang), SK Menteri PUPR No.835/KPTS/M/2019.

2) *Direktur Layanan:*

- a. Bimo Adi Nursanthayasto, ST.,MBA (19 Juli 2018 – 8 Februari 2019), SK Menteri PUPR No.458/KPTS/M/2018 dan N0.133/KPTS/M/2019.

- b. Drs. Agusny Gunawan, M.M (8 Februari 2019 – sekarang), SK Menteri PUPR No. 133/KPTS/M/2019.
- 3) Direktur Keuangan, Arief Rahman Hakim, S.Sos., M.P (21 Maret 2018 - sekarang), SK Menteri PUPR No. 835/KPTS/M/2019.
- 4) Direktur Operasi:
 - a. Nostra Tarigan, S.T., M.M (22 September 2015 – 13 Februari 2019), SK Menteri PUPR No. 471/KPTS/M/2015 dan Keputusan Presiden RI No. 10/M Tahun 2019
 - b. Martanto Boedi Joewono, S.E., M.M (1 Oktober 2019 – sekarang), SK Menteri PUPR No. 835/KPTS/M/2019.
- 5) Direktur umum dan Hukum, Ir. Monhilal, Dipl, S.E (16 November 2017 – sekarang), SK Menteri PUPR No. 919/KPTS/M/2017.

Satuan Pengawasan Intern, Ismail, M.Si, AK., CA (2 Mei 2017 – sekarang), Keputusan Direktur Utama No. 47 Tahun 2017 dan Keputusan Direktur Utama

Susunan Pejabat Kepala Divisi berdasarkan keputusan Direktur Utama PPDPP sebagai berikut :

- 1) Kepala Divisi Pemasaran, Alfian Arif;
- 2) Kepala Divisi Kerjasama, Umi Hardinajati;
- 3) Plt Kepala Divisi Verifikasi, Luwi Wahyu Adi;
- 4) Kepala Divisi Perencanaan dan Penganggaran, Kurniawan Khristianto;
- 5) Kepala Divisi Tata Laksana Keuangan, Achmad Purwo Hardjanto;
- 6) Kepala Divisi Akuntansi, Dede Solihin;
- 7) Kepala Divisi Teknologi Informasi Moch. Ihsan;
- 8) Kepala Divisi Database, Fachri;
- 9) Kepala Divisi Pemantauan dan Evaluasi, Heru Wasisto;
- 10) Kepala Divisi Sumber Daya Manusia, Muhammad Nauval Al-Ammari;
- 11) Kepala Divisi Hukum, Aryana Soeriadiredja;
- 12) Kepala Divisi Humas, Rozalinda Yahya;
- 13) Kepala Divisi Rumah Tangga dan Aset, Aisah Dewi Setiawati.

D. Susunan Dewan Pengawas PPDPP.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR No. 473/KPTS/M/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Susunan Dewan Pengawas PPDPP adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua, Dr. Ir. Lana Winayanti, MCP;
- 2) Anggota, Ir. Mirna Amin, MT;
- 3) Anggota, Moh. Hatta, Ak, MBA; (Telah mengundurkan diri karena menjadi Komisioner BPKP).
- 4) Anggota, Achmad Saefudin, SH;
- 5) Anggota, Ir. Arief Setiabudi Canny

I.4. ISU STRATEGIS.

Secara umum potensi dan permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan perumahan rakyat adalah pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan akan perumahan baru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, dari sisi penyediaan, jumlah rumah yang terbangun belum mampu memenuhi pertumbuhan itu sendiri. Pada RPJMN 2015-2019 pembangunan perumahan diarahkan untuk mengurangi pertumbuhan *backlog* yang mencapai 11,4 juta (tahun 2015) rumah tangga yang telah menghuni rumah, namun bukan milik sendiri sehingga kebutuhan mendesak pemenuhan penyediaan perumahan diarahkan pada penyelesaian jumlah *backlog* sebesar 7,6 juta (tahun 2014) unit berdasarkan konsep penghunian. Kondisi tersebut masih ditambah dengan adanya 3,4 juta unit rumah tidak layak huni yang perlu untuk ditingkatkan kualitas rumahnya beserta akses terhadap prasarana dan sarana utilitas perumahan. Seiring dengan berjalannya waktu angka *backlog* perumahan di Indonesia pada tahun 2016 menurun menjadi 5,9 juta berdasarkan data Badan Pusat Statistik.

Permasalahan tersebut tidak terlepas dari peran serta masyarakat di dalam pembangunan perumahan, peran dan partisipasi aktif Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat penting. Peran tersebut, yang meliputi pendataan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, perlu dioptimalkan. Sebagai contoh, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan dalam bentuk kesiapan sarana dan prasarana serta pembebasan tanah bagi pembangunan perumahan. Dukungan Pemerintah Daerah tersebut perlu ditingkatkan dalam kerangka sinergi pusat dan daerah.

Disamping Pemerintah Daerah, pelaku yang juga perlu diberdayakan adalah masyarakat dan dunia usaha, termasuk BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang selama ini belum didorong secara maksimal. Peran dunia usaha seharusnya dikembalikan sebagai investor yang efektif dan sebagai generator pengembangan kawasan. BUMN harus didorong untuk dapat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sekaligus membantu Pemerintah untuk menyelesaikan target-target yang telah ditetapkan. Sedangkan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, perlu diberdayakan secara terorganisir dan ditempatkan sebagai aktor penting pembangunan.

Disisi lain, terdapat tantangan penyediaan perumahan yaitu;

- a Dukungan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman belum memadai;
- b Koordinasi dan kelembagaan pembangunan perumahan kurang optimal;
- c Peran kontrol Pemerintah terhadap harga lahan dan harga perumahan belum optimal;
- d Efisiensi proses dan mahalnya biaya perizinan untuk pembangunan perumahan kurang maksimal;
- e Terbatasnya dan mahalnya harga bahan bangunan untuk pembangunan perumahan;
- f Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan masih kurang maksimal; dan
- g Pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk pembangunan perumahan perlu dikembangkan.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA.

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA.

Laporan Kinerja memberikan informasi mengenai pencapaian misi sebagai upaya terukur mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu, Laporan Kinerja memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana publik terhadap jasa atau produk prima yang dihasilkan (*excellency*) dan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali (*equity*).

Penyusunan laporan kinerja tahun 2019 ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Kementerian PUPR dan Ditjen Pembiayaan Perumahan serta berpedoman pada Rencana Strategis Bisnis (RSB) Tahun 2015-2019 PPDPP.

2.1.1. Kondisi Umum.

Beberapa capaian strategis bagi pengembangan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman antara lain: pengembangan kebijakan yang terkait dengan bantuan pembiayaan perumahan yang semula memakai skim subsidi menjadi bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), disahkannya Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dimana substansi pendanaan dan sistem pembiayaan menjadi salah satu bab tersendiri dalam kedua UU tersebut.

Di samping capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, masih terdapat target-target pembangunan perumahan yang belum terpenuhi. Seperti belum sepenuhnya bantuan pembiayaan perumahan memfasilitasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki atau menempati rumah layak huni, permasalahan *backlog* penghunian rumah yang diperkirakan sudah mencapai 7,6 juta (tahun 2014) rumah tangga. Seiring dengan berjalannya waktu angka *backlog* perumahan di Indonesia pada tahun 2016 menurun menjadi 5,9 juta berdasarkan data Badan Pusat Statistik.

Sampai saat ini kondisi pasar pembiayaan primer perumahan di Indonesia masih belum efisien baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Dari sisi penawaran diantaranya adalah masih tingginya biaya pengurusan perijinan dan sertifikasi tanah, belum tuntasnya permasalahan pengalihan hak tanggungan secara global dari kreditur lama ke kreditur baru, serta eksekusi hak tanggungan atas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) macet atau gagal bayar yang membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan dari sisi permintaan, diantaranya adalah belum adanya standarisasi dokumen KPR dan standarisasi desain KPR. Dengan kondisi itulah biaya pembangunan rumah yang dibangun oleh pengembang maupun perorangan dinilai masih cukup tinggi.

Secara garis besar permasalahan umum yang terjadi dalam pembiayaan perumahan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Masih terbatasnya bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR untuk memiliki Rumah Sejahtera, termasuk masih terbatasnya skema/pola bantuan pembiayaan perumahan (*availability*) bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 2) Masih rendahnya daya beli atau kemampuan (*affordability*) MBR pada sektor perumahan, baik untuk membeli rumah yang disediakan oleh pengembang maupun untuk meningkatkan kualitas rumah yang sudah tidak layak huni;
- 3) Masih terbatasnya akses MBR ke lembaga keuangan untuk mendapatkan KPR (*accessibility*);
- 4) Masih terjadinya *mismatch* dalam pembiayaan perumahan, akibat sedikitnya ketersediaan dana murah jangka panjang dalam pembiayaan perumahan (*sustainability*).

2.1.2. VISI DAN MISI.

A. VISI

Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya, yaitu **mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI**, yang kemudian dijabarkan ke dalam strategi Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat melalui peningkatan jumlah masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui Fasilitas Bantuan Pembiayaan Perumahan, maka Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan menjabarkan visi tersebut ke dalam visi, misi, tujuan dan sasaran Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang perumahan rakyat sebelumnya, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembiayaan perumahan yang dihadapi lima tahun ke depan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan bidang pembiayaan perumahan tahun 2015-2019.

Oleh Karena itu Visi Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah:

“MENJADI LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN PENGELOLA DANA YANG PROFESIONAL DAN HANDAL DALAM MENDUKUNG PEMENUHAN KEBUTUHAN PERUMAHAN BAGI RAKYAT”.

Uraian Visi:

- Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) merupakan Badan Layanan Usaha (BLU) yang kedudukannya berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri PUPERA No. 20/PRT/M/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PUPERA No. 20/PRT/M/2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 290/KMK.05/2010 PPDPP ditetapkan sebagai Satuan Kerja dengan layanan berupa penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
- Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan merupakan manajemen pengelolaan dana investasi pembiayaan perumahan yang secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip manajemen investasi untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, efektivitas, dan efisiensi pembiayaan perumahan.
- Pembiayaan Perumahan yang dijalankan oleh PPDPP adalah melalui skema FLPP yang kemudian dikenal dengan Kredit Kepemilikan Rumah

(KPR) Sejahtera dengan karakteristik (a) bersifat jangka panjang; (b) bunga tetap sepanjang masa kredit; (c) bunga relatif rendah; (d) bebas PPN; (e) bunga sudah termasuk premi asuransi jiwa, kebakaran dan kredit.

- Terdapat 2 (dua) nilai yang menjadi tujuan utama dalam pembentukan lembaga pembiayaan perumahan, yaitu

1. Profesional.

- a Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memaksimalkan sumber daya dalam penyelenggaraan layanan fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan dan Pengelolaan dana untuk mewujudkan kinerja yang prima dalam operasionalisasi, penggalangan, pengelolaan, dan penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
- b Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan melakukan upaya peningkatan kapabilitas dan kompetensinya sebagai BLU yang bertanggung jawab dalam operasionalisasi, penggalangan, pengelolaan, dan penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
- c Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan menjadi lembaga BLU yang memiliki nilai ekonomis untuk menunjang keberlanjutan pendanaan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Handal.

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan yang handal diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan pembiayaan perumahan yang efektif, strategis, sinergis dan berkelanjutan. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan menjadi lembaga BLU strategis dalam Pengelolaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah secara efisien dan bernilai ekonomis dalam mengkoordinasikan fungsi pada lembaga bank dan non bank.

B. Misi.

Misi Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode 2015-2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat, tugas, fungsi dan kewenangan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan. Misi Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Memberikan layanan penyaluran FLPP yang unggul dan tepat sasaran
- b. Mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan dana bergulir untuk mendukung kesinambungan pembiayaan perumahan rakyat;
- c. Mengembangkan dan mengoptimalkan dukungan teknologi informasi dalam meningkatkan efektifitas layanan FLPP dan pengelolaan dana bergulir;
- d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui penerapan prinsip tatakelola organisasi yang baik dengan dukungan SDM yang professional dan berintegritas

C. TUJUAN.

Tujuan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai. Tujuan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan secara umum adalah menyelenggarakan pengelolaan pembiayaan perumahan sesuai dengan mandat, tugas, fungsi dan kewenangan, yang memenuhi tingkat ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan pembiayaan perumahan yang efektif, strategis, sinergis dan bernilai ekonomis. Lebih lanjut, tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- **Menyelenggarakan Manajemen Pengelolaan Dana dan Pelayanan Pembiayaan Perumahan yang Profesional dan Handal.**

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh terbentuk dan meningkatnya efektivitas sistem pengelolaan dana pembiayaan perumahan, efektivitas sistem layanan pembiayaan perumahan, meningkatnya pendapatan jasa layanan perbankan dan pendapatan lainnya, dan terkelolanya dana investasi Pemerintah secara efektif dan akuntabel.

- **Menyelenggarakan Manajemen Internal yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.**

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh terbentuknya organisasi yang berjalan sesuai fungsi dengan memperhatikan struktur, bisnis proses, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, meningkatnya efektifitas koordinasi perencanaan program, sumber daya, dan pengelolaan administrasi serta pemenuhan standar dan mutu sarana parasana kantor.

2.1.3. KEGIATAN-KEGIATAN STRATEGIS.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan strategis pembangunan perumahan 2015-2019 bidang pembiayaan perumahan, maka PPDPP tahun 2015-2019 akan mendukung pelaksanaan kegiatan butir 8 sampai dengan kegiatan butir 12 dalam kegiatan strategis tersebut, yaitu:

- 1) Terlaksananya bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi pembiayaan rumah sejahtera tapak sebanyak 720.000 unit;
- 2) Terlaksananya bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi pembiayaan satuan rumah susun sederhana milik sebanyak 176.500 unit;
- 3) Terlaksananya bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi pembiayaan KPR/KPA Sarusun Sewa Beli sebanyak 3.500 unit;
- 4) Terlaksananya bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi Kredit Konstruksi sebanyak 6.000 unit;
- 5) Terlaksananya bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi KPR Swadaya sebanyak 450.000 unit.

2.2. PERJANJIAN KINERJA.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* atau penghargaan dan sanksi.

PPDPP telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2019 sesuai amanah yang diembannya berdasarkan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019. Perjanjian kinerja

PPDPP tahun 2019 disusun dengan berdasarkan pada rencana kinerja tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktur Utama dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Perjanjian Kinerja antara Direktur Utama PPDPP dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (BA.033.08)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan			
1	Layanan Promosi Perencanaan dan Bantuan Hukum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan.		31 Dokumen
		1) Jumlah Laporan Pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi	14 Laporan/ Dokumen
		2) Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU)	9 Dokumen
		3) Jumlah Dokumen Legal dan Bantuan Hukum	8 Dokumen
2	Layanan Kerjasama dan Rekonsiliasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK)		84 Lembaga
		1) Jumlah lembaga LJK yang Bekerjasama dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU)	53 Lembaga
		2) Jumlah Rekonsiliasi dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK)	31 Lembaga
3	Layanan Informasi, Evaluasi, Pembinaan dan Dukungan Manajemen Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan		31 Laporan
		1) Jumlah Laporan Keuangan	10 Laporan
		2) Jumlah Verifikasi Permohonan Pencairan Dana dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Pelaksana	2 Laporan
		3) Jumlah Laporan Pemeliharaan Database dan Teknologi Informasi yang Terintegrasi	3 Laporan
		4) Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	2 Laporan
		5) Jumlah Laporan Pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas	6 Laporan
		6) Jumlah Laporan Publikasi Kegiatan Pusat Pengelola Dana Pembiayaan Perumahan (BLU)	6 Laporan
		7) Jumlah Laporan Barang Milik Negara (BMN)	1 Laporan
		8) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1 Laporan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
4	Layanan Internal (Overhead)		I Layanan
		1) Jumlah Perangkat Pengelolaan Data dan Komunikasi	
		2) Jumlah Peralatan Fasilitas Perkantoran	
5	Layanan Perkantoran		12 Bulan Layanan
		1) Biaya Gaji dan Tunjangan	
		2) Jumlah Layanan Perkantoran	

Kegiatan :

Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan

Anggaran

Rp. 67.750.000.000,-

Tabel 2.2
Perjanjian Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok (BA.999.08)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok		
1	Bantuan Pembiayaan Perumahan ke Bank Pelaksana untuk rumah tangga berpenghasilan rendah yang berasal dari DIPA TA 2019	Jumlah unit KPR sejahtera tapak yang difasilitasi bantuan pembiayaan	68.858 Unit Rumah
2	Bantuan Pembiayaan Perumahan yang berasal dari Proyeksi pengembalian pokok yang diterima sampai dengan akhir tahun 2019	Jumlah unit KPR sejahtera tapak yang difasilitasi bantuan pembiayaan	

Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019, dialokasikan anggaran FLPP sejumlah Rp. 5.200.000.000.000,-. Dengan target penyaluran yang tercantum pada DIPA sebanyak 68.858 unit KPR Sejahtera sehingga proyeksi alokasi dana FLPP yang tersedia pada tahun 2019 adalah sejumlah Rp. 7.100.000.000.000,- yang terdiri dari DIPA Rp. 5.200.000.000.000,- dan proyeksi pengembalian pokok dan penarikan kembali Rp. 1.900.000.000.000,-.

Selain itu untuk memenuhi tuntutan peningkatan kebutuhan KPR Sejahtera FLPP, pada bulan Desember 2019 ini telah dilakukan penyesuaian besaran pemanfaatan dana yang bersumber dari pengembalian pokok, yaitu yang semula sebesar Rp. 1.900.000.000.000,- menjadi Rp. 2.400.000.000.000,-. Dengan demikian plafon anggaran FLPP Tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 7.600.000.000.000,- dari sebelumnya sebesar Rp. 7.100.000.000.000,-. Dengan adanya tambahan pemanfaatan dana pengembalian pokok maka target penyaluran KPR Sejahtera FLPP yang semula sebanyak 68.858 unit meningkat menjadi 73.858 unit.

Namun demikian yang tertera didalam kontrak kinerja Dirut PPDPP dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Kontrak Kinerja Dirjen Perbendaharaan (BA.999.03)

No.	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target
1	Pencapaian Ketepatan Sasaran Penyaluran FLPP	Presentase rumah yang ditempati MBR setelah masa 1 (satu) tahun sejak penandatanganan akad	100%
2	Penyaluran Dana Kelolaan	Realisasi jumlah dana kelolaan tersalurkan kepada MBR dalam bentuk KPR FLPP dalam unit rumah	68.858 unit
3	Pendapatan Layanan dan Non Layanan	Realisasi PNBPN BLU berupa pendapatan dari jasa layanan	Rp299 miliar
4	Pengembangan Sistem Informasi BLU	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	80%
5	Pengembangan Sistem	Persentase penyelesaian modernisasi Pengelolaan BLU	100%

Dalam kontrak kinerja tersebut, pendapatan BLU PPDPP tahun 2019 dari tarif Layanan dan Non Layanan yang semula ditargetkan sebesar Rp. 246.000.000.000,- ditingkatkan menjadi sebesar Rp. 299.000.000.000,-.

2.3. METODE PENGUKURAN

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan pencapaian indikator yang tertuang di dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) dengan realisasi yang dihasilkan sepanjang tahun anggaran.

Sebagaimana tercermin dalam RSB PPDPP dan tertuang di dalam Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan 2015-2019 tentang Program dan Kegiatan Teknis Bidang Pembiayaan, sekaligus dalam rangka mendukung pencapaian sasaran teknis/output sebagaimana tersebut di atas, maka PPDPP memiliki kegiatan teknis, yaitu

Dukungan Penyaluran Pembiayaan Perumahan.

Output dari kegiatan teknis tersebut adalah:

- Layanan promosi, perencanaan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan;
- Layanan Kerjasama dan Rekonsiliasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK); dan

- c) Layanan informasi, evaluasi, pembinaan dan dukungan manajemen Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan.

Indikator Kegiatan (Output) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan dari pelaksanaan dan tercapainya *output* dari kegiatan tersebut. Penetapan indikator dilakukan dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga mudah diukur, mudah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang tersedia. Indikator Kinerja Utama (IKU) *Output* diukur berdasarkan Perjanjian Kerja dengan uraian sebagai berikut:

- a. Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan :
- a) Layanan promosi, perencanaan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, legal dan bantuan hukum :
 - 1) Jumlah laporan pelaksanaan promosi dan sosialisasi;
 - 2) Jumlah dokumen perencanaan anggaran Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan;
 - 3) Jumlah Dokumen Legalitas dan Bantuan Hukum.
 - b) Layanan kerjasama dan rekonsiliasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) :
 - 1) Jumlah Lembaga Jasa Keuangan yang bekerjasama dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan;
 - 2) Jumlah rekonsiliasi dengan Lembaga Jasa Keuangan.
 - c) Layanan informasi, evaluasi, pembinaan dan dukungan manajemen Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan :
 - 1) Jumlah laporan keuangan;
 - 2) Jumlah laporan evaluasi kinerja;
 - 3) Jumlah verifikasi permohonan pencairan dana dari LJK pelaksana;
 - 4) Jumlah laporan pemeliharaan database dan teknologi informasi yang terintegrasi;
 - 5) Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan;
 - 6) Jumlah laporan pemenuhan SDM yang berkualitas;
 - 7) Jumlah laporan publikasi kegiatan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan;
 - 8) Jumlah laporan BMN.

- d) Layanan Internal (Overhead) :
 - 1) Jumlah perangkat pengolahan data dan komunikasi;
 - 2) Jumlah Peralatan Fasilitas Perkantoran.
- e) Layanan perkantoran :
 - 1) Jumlah Layanan Perkantoran.
- b. Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok :
 - a) Bantuan Pembiayaan Perumahan ke Bank Pelaksana untuk rumah tangga berpenghasilan rendah yang berasal dari DIPA 2019 :
 - 1) Jumlah unit KPR sejahtera tapak yang difasilitasi bantuan pembiayaan.
 - b) Bantuan Pembiayaan Perumahan yang berasal dari Proyeksi pengembalian pokok yang diterima sampai dengan akhir tahun 2019 :
 - 1) Jumlah unit KPR sejahtera tapak yang difasilitasi bantuan pembiayaan.
- c. Pengelolaan Dana Investasi :
 - a) Pencapaian Ketepatan Sasaran Penyaluran FLPP :
 - 1) Presentase rumah yang ditempati MBR setelah masa 1 (satu) tahun sejak penandatanganan akad.
 - b) Penyaluran Dana Kelolaan :
 - 1) Realisasi jumlah dana kelolaan tersalurkan kepada MBR dalam bentuk KPR FLPP dalam unit rumah.
 - c) Pendapatan Layanan dan Non Layanan :
 - 1) Realisasi PNBP BLU berupa pendapatan dari jasa layanan dan non layanan.
 - d) Modernisasi pengelolaan BLU :
 - 1) Presentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU.

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh PPDPP yang meliputi program dan kegiatan dalam periode Tahun Anggaran 2019.

2.4. TARGET TAHUN INI MENURUT RENCANA STRATEGIS BISNIS.

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh PPDPP yang meliputi program dan kegiatan dalam periode Tahun Anggaran 2019. Dalam penyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan, program maupun lembaga didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya:

- 1) Target menggambarkan angka kualitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran; dan
- 2) Penetapan target relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan *baseline* data yang jelas.

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator sasaran strategis PPDPP yang didasarkan dari *roadmap* selama tahun anggaran 2019. Target sasaran PPDPP (*outcome-impact*), sasaran program (*outcome*), dan sasaran kegiatan (*output*) untuk Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan (BA.033) dan Program Investasi Pemerintah (BA.999.03).

Berpedoman pada RSB BLU PPDPP target penyaluran FLPP 2019 adalah sebesar 120.000 unit rumah, sedangkan dalam Renstra Ditjen Pembiayaan Perumahan Nomor 18 Tahun 2019 target penyaluran adalah sebanyak 68.858 unit rumah.

Penyesuaian target pada tahun 2019 terjadi seiring adanya dinamika dalam penyaluran FLPP dan mempertimbangkan prioritas *spending* kapasitas fiskal pemerintah yang juga dibahas di DPR, dana DIPA yang dapat disediakan adalah sesuai dengan kapasitas fiskal yang ada.

Total pendanaan untuk Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan (BA.033.08) selama tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 67.750.000.000,- untuk dukungan penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan.

Sedangkan untuk Program Investasi Pemerintah yang bersumber dari DIPA (BA.999.03) sebesar Rp. 5.200.000.000.000,- dan proyeksi pengembalian pokok yang akan diterima sampai akhir tahun 2019 sebesar Rp. 1.900.000.000.000,-. Dengan demikian target anggaran dana FLPP yang tersedia pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 7.100.000.000.000,- yang dipergunakan untuk target penyaluran bantuan perumahan sebanyak 68.858 unit KPR Sejahtera FLPP.

Kinerja capaian penyaluran dana FLPP sampai dengan bulan Desember 2019 sejumlah 77.835 unit atau telah mencapai 113,04% dari target sejumlah 68.858 unit, dengan nilai FLPP sebesar Rp. 7.545.288.389.505,- atau mencapai 106,27% dari target Rp. 7.100.000.000.000,-. Akumulasi secara total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 sebanyak 655.602 unit dengan nilai FLPP sebesar Rp 44.366.000.000.000,-. Angka realisasi ini tidak termasuk penyaluran KPR Sejahtera yang bersumber dari dana talangan bank pelaksana sebanyak Angka realisasi ini tidak termasuk penyaluran KPR Sejahtera yang bersumber dari dana talangan bank pelaksana sebanyak 14.580 unit dengan nilai Rp 1.458.000.000.000,-.

BAB 3

KAPASITAS ORGANISASI.

3.1. SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN.

Sebagai unit yang bergerak di bidang pembiayaan, kemampuan sumber daya manusia yang profesional menjadi suatu keharusan bagi PPDPP dalam menjalankan tugasnya yaitu melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan untuk memberikan akses kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki rumah yang layak huni melalui KPR Sejahtera FLPP. Diharapkan pengalaman yang sudah didapat selama ini dapat mendukung profesionalitas dalam pelaksanaan tugas untuk pencapaian target penyaluran KPR Sejahtera FLPP.

Jumlah pegawai di lingkungan PPDPP per tanggal 31 Desember 2019 sejumlah 117 orang pegawai, dengan rincian sebagai berikut :

A. Jumlah Pegawai PPDPP Menurut Jabatan.

Untuk jabatan Pejabat Pengelola sampai saat ini sudah terisi dengan lengkap, sementara untuk jabatan Kepala Divisi sampai saat ini terdiri dari 12 orang Kepala Divisi, yaitu : Kepala Divisi Perencanaan Anggaran, Kepala Divisi Tata Laksana Keuangan, Kepala Divisi Akuntansi, Kepala Divisi Kerjasama, Kepala Divisi Pemasaran, Kepala Divisi Teknologi Informasi, Kepala Divisi Database, Kepala Divisi Pemantauan dan Evaluasi, Kepala Divisi Hukum, Kepala Divisi Humas, Kepala Divisi SDM, Kepala Divisi Rumah Tangga dan Aset, dan 1 Plt. Kepala Divisi Verifikasi. Jumlah pegawai PPDPP menurut jabatan saat ini sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.
Jumlah Pegawai PPDPP Menurut Jabatan.

No	Jabatan	Jumlah
Pejabat Pengelola dan Pegawai (Pegawai Tetap) :		
1.	Direktur Utama.	1
2.	Direktur.	4
3.	Kepala SPI.	1
4.	Kepala Divisi.	12
5.	Plt. Kepala Divisi.	1
6.	Pegawai Tetap (SK Dirut).	44

Pegawai PKWT (Pegawai Kontrak) :		
1.	Pegawai Kontrak (SK Satker).	33
2.	Staf Tenaga Layanan Perkantoran.	21
Jumlah		117

Sumber : Data Kepegawaian PPDPP.

B. Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian.

Berdasarkan status kepegawaian terdapat 16 orang pegawai PNS dan 101 orang pegawai Non PNS dengan perincian sebagaimana berikut :

Tabel 3.2.
Jumlah Pegawai PPDPP Menurut Status Kepegawaian

No	Jenis Pegawai	Jumlah
1	Total PNS, terdiri dari:	16
	- Golongan IV/e	1
	- Golongan IV/d	
	- Golongan IV/c	2
	- Golongan IV/b	2
	- Golongan IV/a	2
	- Golongan III/d	4
	- Golongan III/c	5
	- Golongan III/b	0
	- Golongan III/a	0
2	Non PNS	101
Jumlah		117

C. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.

Berdasarkan tingkat Pendidikan, pegawai PPDPP terdiri dari tingkat Pendidikan SD sampai dengan S3 dengan perincian sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.3.

Jumlah Pegawai PPDPP Menurut Tingkat Pendidikan.

No	Pendidikan	Jumlah
1	S3	1
2	S2	24
3	S1	62
4	D3	9
5	SLTA	14
6	SMP	6
7	SD	1
Jumlah		117

D. Jumlah Pegawai PPDPP berdasarkan Interval Usia.

Jumlah pegawai PPDPP terdiri dari PNS dan Non PNS berdasarkan interval usia dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.4.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Interval Usia.

No	Interval	Jumlah
1	Dibawah s/d 30 tahun.	41
2	31 s/d 50 tahun.	69
3	51 s/d 60 tahun.	7
Jumlah		117

E. Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Kementerian.

Berdasarkan status kepegawaian PNS yang dipekerjakan pada PPDPP terdiri dari PNS Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan BPKP dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.5.

Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Kementerian.

No	Instansi	Jumlah
1	PNS PUPR	11
2	PNS Kemenkeu	4
3	PNS BPKP	1
Jumlah		16

3.2. SARANA PRASARANA.

Fasilitas kerja yang merupakan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kinerja pegawai. Faktor yang diperhitungkan untuk meningkatkan gairah kerja pegawai adalah fasilitas kerja yang memadai dan dapat membantu pegawai dalam mengerjakan tugasnya. Hal ini cukup beralasan sebab fasilitas kerja merupakan faktor yang mempengaruhi manajemen sarana dan prasarana suatu organisasi dalam mendukung proses berjalannya suatu organisasi.

Sistem penyelenggaraan pemerintah secara menyeluruh telah mengalami perubahan baik di pusat maupun di daerah dengan berbasis kinerja, tingkat capaian yang berdasarkan pada kinerja serta pelayanan yang prima, untuk mencapai keberhasilan kinerja yang baik pegawai pemerintah diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan perkembangan teknologi membuka konsekuensi dengan tuntutan perubahan untuk mengikuti perkembangan teknologi, sarana dan prasarana jika tidak disiapkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi akan mengalami ketertinggalan atau keterbelakangan di segala bidang. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu proses manajemen sarana dan prasarana agar lebih menjamin bahwa unit kerja ini sudah tersedia sarana dan prasarana yang cukup sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung berbagai kegiatan, tugas dan fungsi yang sesuai, cepat, tepat dan bermanfaat.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan sangat mendukung pelaksanaan tugas PPDPP. Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada saat ini sudah cukup memadai. Adapun gedung yang saat ini ditempati adalah gedung yang disewa oleh PPDPP yang beralamat di Jl. Palatehan I No. 27 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan. Keberadaan gedung pada saat ini masih belum bisa mengakomodir seluruh kegiatan operasional. Untuk itu, perlu dilakukan penambahan ruangan terutama untuk ruangan penyimpanan arsip dan penyimpanan aset PPDPP. Selama ini PPDPP menyimpan arsip dan aset dengan menyewa gudang yang terletak jauh dari kantor PPDPP, yaitu yang berlokasi di Ciputat Tangerang Selatan.

Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2019 dapat disajikan dalam tabel 3.6 berikut: (sumber: Data Manual BMN 2019)

Tabel 3.6.

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN GABUNGAN
INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL RINCIAN PER SUB-
SUB KELOMPOK BARANG TAHUN ANGGARAN 2019**

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	PERALATAN DAN MESIN		1,103	12.260.478.320	23	799.216.000	0	0	1,126	13.059.694.320
3.02.01.01.001	Sedan	Unit	1	459.200.000	0	0	0	0	1	459.200.000
3.02.01.01.003	Station Wagon	Unit	5	1.266.700.000	0	0	0	0	5	1.266.700.000
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	Unit	3	48.195.000	0	0	0	0	3	48.195.000
3.03.03.07.010	Scanner (Universal Tester)	Buah	9	71.000.000	0	0	0	0	9	71.000.000
3.04.01.04.004	Lemari Penyimpan	Buah	6	22.319.000	0	0	0	0	6	22.319.000
3.05.01.01.004	Mesin Ketik Listrik	Buah	1	3.400.000	0	0	0	0	1	3.400.000
3.05.01.01.008	Mesin Ketik Elektronik/Selektik	Buah	1	2.787.000	0	0	0	0	1	2.787.000
3.05.01.02.007	Mesin Penghitung Uang	Buah	2	7.375.000	0	0	0	0	2	7.375.000
3.05.01.03.009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	2	79.200.000	0	0	0	0	2	79.200.000
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	Buah	16	55.950.000	0	0	0	0	16	55.950.000
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	Buah	38	402.798.440	0	0	0	0	38	402.798.440
3.05.01.04.003	Rak Besi	Buah	7	49.055.000	0	0	0	0	7	49.055.000
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	Buah	1	2.500.000	0	0	0	0	1	2.500.000
3.05.01.04.006	Filing Cabinet Kayu	Buah	9	189.205.500	0	0	0	0	9	189.205.500
3.05.01.04.007	Brandkas	Buah	4	15.075.000	0	0	0	0	4	15.075.000
3.05.01.04.013	Buffet	Buah	15	59.032.600	0	0	0	0	15	59.032.600
3.05.01.04.015	Locker	Buah	6	14.930.000	0	0	0	0	6	14.930.000
3.05.01.04.024	Laci Box	Buah	2	4.400.000	0	0	0	0	2	4.400.000
3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	29	74.100.000	0	0	0	0	29	74.100.000
3.05.01.05.010	White Board	Buah	3	3.420.000	0	0	0	0	3	3.420.000
3.05.01.05.013	Copy Board/Elektrik White Board	Buah	1	27.150.000	0	0	0	0	1	27.150.000
3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	Buah	13	43.670.000	0	0	0	0	13	43.670.000
3.05.01.05.017	Mesin Absensi	Buah	2	12.000.000	0	0	0	0	2	12.000.000
3.05.01.05.038	Laser Pointer	Buah	4	4.800.000	0	0	0	0	4	4.800.000
3.05.01.05.047	Lampu-lampu Kristal	Buah	2	10.120.000	0	0	0	0	2	10.120.000
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	Buah	9	95.966.000	0	0	0	0	9	95.966.000
3.05.01.05.051	Softboard	Buah	3	292.500	0	0	0	0	3	292.500

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.05.01.05.052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	6	6.900.000	0	0	0	0	6	6.900.000
3.05.01.05.057	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	Buah	5	202.500.000	0	0	0	0	5	202.500.000
3.05.01.99.999	Alat Kantor Lainnya		11	179.840.000	0	0	0	0	11	179.840.000
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	119	569.566.262	0	0	0	0	119	569.566.262
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	224	400.115.680	0	0	0	0	224	400.115.680
3.05.02.01.004	Kursi Kayu	Buah	36	242.399.455	0	0	0	0	36	242.399.455
3.05.02.01.005	Sice	Buah	1	9.966.000	0	0	0	0	1	9.966.000
3.05.02.01.008	Meja Rapat	Buah	7	92.650.000	0	0	0	0	7	92.650.000
3.05.02.01.014	Meja Resepsionis	Buah	1	9.438.000	1	19.789,000	0	0	2	29.227.000
3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	36	28.963.110	0	0	0	0	36	28.963.110
3.05.02.01.027	Cubikal	Buah	2	19.800.000	0	0	0	0	2	19.800.000
3.05.02.01.999	Meubelair Lainnya		17	69.918.178	0	0	0	0	17	69.918.178
3.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1	19.800.000	0	0	0	0	1	19.800.000
3.05.02.04.004	A.C. Split	Buah	24	155.050.000	4	46.200,000	0	0	28	201.250.000
3.05.02.04.006	Kipas Angin	Buah	7	27.157.000	0	0	0	0	7	27.157.000
3.05.02.04.999	Alat Pendingin Lainnya		2	6.850.000	0	0	0	0	2	6.850.000
3.05.02.06.002	Televisi	Buah	11	88.520.000	6	19,470,000	0	0	17	107.990.000
3.05.02.06.008	Sound System	Buah	0	-	1	119,757,000	0	0	1	119.757.000
3.05.02.06.020	Camera Video	Buah	1	23.850.000	0	0	0	0	1	23.850.000
3.05.02.06.036	Dispenser	Buah	5	12.850.000	0	0	0	0	5	12.850.000
3.05.02.06.046	Handy Cam	Buah	1	7.550.000	0	0	0	0	1	7.550.000
3.05.02.06.056	Karpet	Buah	15	12.498.585	0	0	0	0	15	12.498.585
3.05.02.06.080	Bracket Standing Peralatan	Buah	0	-	1	20,350,000	0	0	1	20.350.000
3.05.02.99.999	Alat Rumah Tangga Lainnya		1	5.556.210	0	0	0	0	1	5.556.210
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	6	120.808.000	0	0	0	0	6	120.808.000
3.06.01.01.999	Peralatan Studio Audio Lainnya		0	-	1	199,100,000	0	0	1	199.100.000
3.06.01.02.107	Layar Film/Projector	Buah	2	12.000.000	0	0	0	0	2	12.000.000
3.06.01.02.128	Camera Digital	Buah	7	96.560.000	0	0	0	0	7	96.560.000
3.06.02.01.001	Telephone (PABX)	Buah	26	48.680.000	0	0	0	0	26	48.680.000
3.06.02.01.004	Telephone Mobile	Buah	6	94.050.000	0	0	0	0	6	94.050.000
3.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	Buah	12	49.440.000	0	0	0	0	12	49.440.000
3.06.02.01.010	Facsimile	Buah	1	2.508.000	0	0	0	0	1	2.508.000
3.06.02.06.002	Wireless Amplifier	Buah	1	3.100.000	0	0	0	0	1	3.100.000
3.06.02.99.999	Alat Komunikasi Lainnya		2	197.373.000	0	0	0	0	2	197.373.000

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.06.03.19.001	Switcher Combination	Buah	2	64.841.900	0	0	0	0	2	64.841.900
3.09.04.02.031	Kamera Digital	Buah	5	21.125.000	0	0	0	0	5	21.125.000
3.09.04.07.035	Finger Print Camera	Buah	2	8.600.000	0	0	0	0	2	8.600.000
3.10.01.02.001	P.C Unit	Buah	118	1.609.668.500	0	0	0	0	118	1.609.668.500
3.10.01.02.003	Note Book	Buah	56	951.342.400	0	0	0	0	56	951.342.400
3.10.02.01.004	Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)	Buah	1	33.000.000	0	0	0	0	1	33.000.000
3.10.02.01.015	Data Patch Panel	Buah	6	36.300.000	0	0	0	0	6	36.300.000
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	78	357.343.000	0	0	0	0	78	357.343.000
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	35.732.000	0	0	0	0	3	35.732.000
3.10.02.04.001	Server	Buah	9	2.984.939.100	0	0	0	0	9	2.984.939.100
3.10.02.04.002	Router	Buah	6	128.723.900	1	50.050.000	0	0	7	178.773.900
3.10.02.04.014	Rak Server	Buah	2	25.289.000	1	16.225.000	0	0	3	41.514.000
3.10.02.04.023	Wireless Access Point	Buah	18	65.000.000	0	0	0	0	18	65.000.000
3.10.02.04.024	Switch	Buah	1	800.000	5	273.020.000	0	0	6	273.820.000
3.10.02.04.999	Peralatan Jaringan Lainnya		0	-	2	35.255.000	0	0	2	35.255.000
3.19.01.02.001	Alat Tenis Meja	Buah	1	4.475.000	0	0	0	0	1	4.475.000
3.19.01.06.999	Peralatan Olah Raga Lainnya		5	92.400.000	0	0	0	0	5	92.400.000
135111	ASET TETAP DALAM RENOVASI		2	2.855.857.200	0	0	0	0	2	2.855.857.200
6.07.03.01.001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi		2	2.855.857.200	0	0	0	0	2	2.855.857.200
135121	ASET TETAP LAINNYA		6	17.684.700	0	0	0	0	6	17.684.700
6.01.03.03.003	Ukiran Kayu dan sejenisnya	Buah	6	17.684.700	0	0	0	0	6	17.684.700
166112	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN		1	245.100.000	0	0	0	0	1	245.100.000
3.02.01.01.003	Station Wagon	Unit	1	245.100.000	0	0	0	0	1	245.100.000
TOTAL				15.379.120.220		799.216.000		0		16.178.336.220

Selain itu, Sistem ERP (*Enterprise Resource Planning*) juga menjadi kebutuhan yang harus segera dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pencapaian target kinerja PPDPP dalam hal:

A. Pelayanan.

Dalam memberikan pelayanan pencairan dana kepada bank pelaksana, PPDPP berpedoman pada Pasal 28 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Permintaan pembayaran dana FLPP oleh Bank Pelaksana kepada PPDPP disampaikan secara tertulis dan harus dilengkapi dengan:
 - a. Surat permintaan pembayaran dana FLPP yang ditandatangani oleh pejabat Bank Pelaksana yang berwenang;
 - b. Surat pernyataan verifikasi;
 - c. Daftar rekapitulasi debitur/nasabah KPR Sejahtera;
 - d. Surat tanda terima uang dan jadwal angsuran dari Bank Pelaksana terhadap pembayaran dana FLPP periode sebelumnya; dan,
 - e. Dokumen lain yang dipersyaratkan diatur dalam perjanjian kerjasama operasional antara Bank Pelaksana dengan PPDPP.
- (2) PPDPP melakukan pengujian terhadap dokumen permintaan pembayaran dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pengujian dituangkan dalam lembar hasil pengujian.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen permintaan pembayaran dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) diterima lengkap dan benar oleh PPDPP yang dibuktikan dengan konfirmasi dari PPDPP.
- (4) Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPDPP melakukan pembayaran dana FLPP ke rekening program FLPP KPR Sejahtera.
- (5) Pembayaran dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah hasil pengujian.
- (6) Dalam hal dokumen permintaan pembayaran dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*), maka dokumen cetak (*hardcopy*) harus disampaikan Bank Pelaksana paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen digital (*softcopy*) diterima lengkap dan benar oleh PPDPP.
- (7) Batas waktu pengajuan permintaan pembayaran dana FLPP dari Bank

Pelaksana kepada PPDPP diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama operasional.

Ketentuan dalam rangka Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) antara PPDPP dan Bank Pelaksana dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pengajuan Permintaan Pembayaran :

1. Bank Pelaksana menyampaikan dokumen permintaan pembayaran dana FLPP kepada PPDPP sesuai format yang berlaku yang dilengkapi dengan kelengkapan administrasi, KTP, dan NPWP pemohon dalam bentuk dokumen digital.
2. PPDPP melakukan pengujian permintaan dana FLPP yang diajukan oleh Bank Pelaksana menggunakan teknologi informasi yang ditetapkan oleh PPDPP.
3. Permintaan pembayaran dari Bank Pelaksana dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal akad kredit KPR Sejahtera.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pencairan dana kepada bank pelaksana, maka PPDPP melakukan pengujian deokumen permintaan dana FLPP melalui sistem e-FLPP dengan cara sebagai berikut:

1. Proses pengecekan kelengkapan dokumen:
 - Sistem akan menyimpan berkas (*softcopy*) dokumen yang telah diinput oleh bank pelaksana sebagai lampiran Permintaan Pembayaran Dana FLPP.
 - Sistem selanjutnya akan melakukan pengujian otomatis (*automatic validation*) terhadap “Format-” setelah dilakukan persetujuan oleh Direktorat Layanan PPDPP.
2. Proses pengujian otomatis (*automatic validation*):
 - Field yang akan diuji dalam Sistem e-FLPP yaitu by Nama, No KTP, No NPWP dan No Rekening dengan Database Debitur e-FLPP yang sudah terekam sejak tahun 2010-2017.
 - Sistem e-FLPP juga akan melakukan summary secara otomatis, dengan menguji field by Gaji Pokok, Harga Jual Rumah dan Nilai Angsuran dengan nilai yang telah ditentukan.
 - Sistem hanya akan memproses Format-i yang sudah ditentukan sesuai dengan format sistem.
3. Pembayaran Dana FLPP
 - Dilakukan proses pembayaran dana FLPP kepada Bank Pelaksana sesuai dengan rekomendasi output dari hasil pengujian Sistem e-FLPP.

B. Keuangan

PPDPP telah menggunakan sistem informasi akuntansi yang mendukung pelaporan keuangan, sampai saat ini PPDPP sudah mengembangkan sistem monitoring

pengembalian pokok agar dapat memantau data *outstanding* dana dari masing-masing debitur dari setiap bank pelaksana yang telah mendapatkan bantuan dana FLPP.

Lebih lanjut pada tahun 2019, melalui kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan di setiap bank pelaksana, PPDPP saat ini sudah dapat melakukan perhitungan proyeksi pengembalian pokok dan tarif jasa layanan terhadap masing-masing bank pelaksana.

Sejalan dengan hal tersebut kegiatan uji petik debitur FLPP di atas 5 tahun dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui potensi nasabah FLPP yang memiliki keinginan pelunasan dipercepat dan kepastian debitur masih mengangsur setelah diatas 5 tahun.

Saat ini, dana yang digunakan untuk bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR, sebagian besar berasal dari dan APBN yang semakin lama semakin terbatas ketersediaannya. Oleh karena itu perlu dukungan dengan berbagai aturan yang memberikan peluang untuk mengelola dana-dana secara lebih fleksibel, tidak hanya bersumber dari dan APBN, tetapi juga dari dan non APBN.

Dalam rangka menjawab persoalan tersebut, pemerintah perlu menyusun kebijakan dan strategi yang efektif dalam rangka menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan agar bantuan pembiayaan perumahan dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Untuk dapat merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat, maka pemerintah perlu meninjau kembali skema-skema bantuan pembiayaan perumahan yang dirasa tepat untuk di aplikasikan dengan kondisi Indonesia saat ini melalui berbagai analisis yang komprehensif sehingga program FLPP dapat terjamin keberlanjutannya.

3.3. DIPA PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

DIPA PPDPP berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun anggaran 2019, PPDPP memperoleh anggaran yang dialokasikan dalam 2 (dua) program yaitu:

A. Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan (BA.033).

Untuk mendukung kegiatan operasional, pada tahun 2019 PPDPP menggunakan dana yang berasal dari pendapatan PNBP yang dituangkan dalam DIPA Nomor : SP DIPA-033.08.1.499686/2019, tanggal 5 Desember 2018 dengan alokasi dana sebesar Rp 67.750.000.000,-.

B. Program Investasi Pemerintah (BA.999.03).

Pada tahun 2019 PPDPP mendapatkan alokasi dana bergulir melalui DIPA BUN Nomor SP DIPA- 999.03.1.984532/2019, tanggal 15 Januari 2019 dan direvisi tanggal 02 April 2019.

Program Investasi Pemerintah yang bersumber dari DIPA (BA.999.03) sebesar Rp5.200.000.000.000,- dan proyeksi pengembalian pokok yang akan diterima sampai akhir tahun 2019 sebesar Rp. 1.900.000.000.000,-. Dengan demikian target anggaran dana FLPP yang tersedia pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 7.100.000.000.000,- yang dipergunakan untuk target penyaluran bantuan perumahan sebanyak 68.858 unit KPR Sejahtera FLPP.

Kinerja capaian penyaluran dana FLPP sampai dengan bulan Desember 2019 sejumlah 77.835 unit atau telah mencapai 113,04% dari target sejumlah 68.858 unit, dengan nilai FLPP sebesar Rp. 7.545.288.389.505,- atau mencapai 106,27% dari target Rp. 7.100.000.000.000,-. Akumulasi secara total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 sebanyak 655.602 unit dengan nilai FLPP sebesar Rp. 44.366.000.000.000,-. Angka realisasi ini tidak termasuk penyaluran KPR Sejahtera yang bersumber dari dana talangan bank pelaksana sebanyak 14.580 unit dengan nilai Rp. 1.458.000.000.000,-. Sehingga pada tahun 2019 PPDPP memiliki alokasi dan proyeksi dana sebesar sebesar Rp. 7.545.288.389.505,- untuk membiayai 68.858 unit rumah.

3.4. POTENSI DAN HAMBATAN

Potensi yang dimiliki oleh BLU PPDPP adalah perluasan potensi pendapatan yang bersumber dari TI layanan pembiayaan perumahan. Sedangkan hambatan berdasarkan faktor *man*, *money*, *material*, dan *method* yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor *man*, yaitu adanya ketidakseimbangan jumlah antara pegawai PNS dan Non-PNS di BLU PPDPP yang mengakibatkan kesulitan dalam penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran.
- b. Faktor *money*, yaitu adanya dana idle cash yang tidak bisa digunakan untuk penyaluran dana FLPP
- c. Faktor *material*, yaitu masih belum adanya gedung milik sendiri yang selama ini digunakan untuk operasional BLU PPDPP
- d. Faktor *method*, yaitu masih diperlukannya pengembangan pengaturan regulasi internal BLU PPDPP

BAB 4

AKUNTABILITAS KINERJA.

4.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

Tahun 2019 merupakan tahun kelima dalam pelaksanaan Rencana Strategis Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Melalui pengukuran kinerja diperoleh gambaran pencapaian masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di masa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Capaian kinerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan pada tahun 2019 akan diuraikan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, serta melakukan analisis dan evaluasi atas pencapaian kinerja tahun 2019 ini untuk mendapatkan umpan-balik guna melakukan perbaikan pada tahun 2020. Pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan tahun 2020-2024 mempunyai program, yaitu **“Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan”**. Tanggung jawab PPDPP atas sasaran strategis tersebut, yaitu sebagai berikut:

A. Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan.

1. Sasaran I : Layanan Promosi, Perencanaan dan Bantuan Hukum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU).

Dalam kaitan dengan sasaran Layanan Promosi, Perencanaan dan Bantuan Hukum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU) mengidentifikasi tiga indikator kinerja dengan hasil capaian sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 4.1.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.

No	Indikator Kinerja	Satun	Capaian Kinerja		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
I	Layanan Promosi, Perencanaan dan Bantuan Hukum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU)		31	31	100,00
	1) Jumlah Laporan Pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi	Laporan/Dokumen	14	14	100,00
	2) Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU)	Dokumen	9	9	100,00
	3) Jumlah Dokumen Legal dan Bantuan Hukum	Laporan/Dokumen	8	8	100,00

Dalam rangka tercapainya sasaran I ini tidak terlepas dari terlaksananya komponen kegiatan:

- 1) Pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi :
 - a. Sosialisasi KPR Sejahtera FLPP;
 - b. Partisipasi Pameran 2019;
 - c. Pelaksanaan Multimedia Pameran Rumah Rakyat 2019;
 - d. Survei Kepuasan Pelanggan;
 - e. Pelaksanaan Marketing dan Komunikasi Produk KPR Sejahtera;
 - f. Penyelenggaraan Percepatan Program KPR Sejahtera FLPP;
 - g. Strategi Pemasaran Untuk Penguatan Brand PPDPP dan FLPP;
 - h. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Dan Evaluasi PKO TA 2019.
- 2) Perencanaan Anggaran Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan. Dalam rangka menyusun dokumen Perencanaan Anggaran Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan BLU PPDPP telah menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran yang terdiri dari :
 - a. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran BA 999.03.
 - b. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran BA 033.08.
 - c. Dokumen DIPA BA 999.03.
 - d. Dokumen DIPA BA 033.08.
 - e. Dokumen Rencana Bisnis Anggaran PPDPP
 - f. Dokumen Proposal Target Penerimaan Negara Bukan Pajak PPDPP Tahun Anggaran 2020.

- g. Dokumen Indikator Kebutuhan Dana BUN.
- h. Dokumen Rencana Strategis Bisnis 2020-2024.
- i. Dokumen Penyusunan Skema Pembiayaan.

3) Dokumen Legal dan Bantuan Hukum, yang terdiri dari:

Dalam rangka penyusunan legal dan bantuan hukum telah dihasilkan dokumen Penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum dan Peraturan Perundangan yang berisikan Peraturan-peraturan atau keputusan Direktur Utama PPDPP, Legal drafting PKO serta kegiatan advokasi bantuan hukum.

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja untuk sasaran 1 yang terdiri dari komponen Layanan Promosi, Perencanaan Anggaran dan Bantuan Hukum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU) mencapai 31 dokumen atau 100.00% dari target 31 Dokumen.

2. Sasaran 2 : Layanan Kerjasama dan Rekonsiliasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK)

Indikator kinerja dari sasaran 2 tersebut beserta target dan realisasinya sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.2.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
2	Layanan Kerjasama dan Rekonsiliasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK)		84	84	100,00
	1) Jumlah lembaga LJK yang Bekerjasama dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU)	Lembaga	53	39	100,00
	2) Jumlah Rekonsiliasi dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK)	Lembaga	31	45	100,00

Dalam rangka tercapainya sasaran 2 yaitu Layanan Kerjasama dan Rekonsiliasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) tidak terlepas dari terlaksananya komponen kegiatan yang terdiri dari:

- 1) Rencana Kerjasama Kelembagaan yaitu Pelaksanaan Kerjasama Operasional Tahun Anggaran 2019;
- 2) Rekonsiliasi dengan Lembaga Jasa Keuangan, yang terdiri dari Rekonsiliasi dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

Pada komponen Lembaga LJK yang bekerjasama dengan PPDPP dari target 53 pada tahun 2019 dapat direalisasikan sebanyak 53 bank pelaksana sedangkan pada komponen Rekonsiliasi dengan LJK dengan target 31 lembaga LJK dapat direalisasikan rekonsiliasi terhadap 31 bank pelaksana dengan adanya perubahan metode rekonsiliasi yaitu rekonsiliasi dilakukan di lokasi masing-masing bank pelaksana.

Secara keseluruhan capaian kinerja Layanan Kerjasama dan Rekonsiliasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sudah mencapai target, yaitu 84 lembaga atau 100,00 % dari target 84 lembaga.

3. Sasaran 3 : Laporan Informasi, Evaluasi, Pembinaan dan Dukungan Manajemen Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan.

Indikator kinerja dari sasaran 3 tersebut beserta target dan realisasinya sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.3.
Capaian Kinerja Sasaran 3.

No	Indikator Kinerja	Satun	Capaian Kinerja		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
3	Layanan Informasi, Evaluasi, Pembinaan dan Dukungan Manajemen Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU).		31	31	100
	1) Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	10	10	100
	2) Jumlah Verifikasi Permohonan Pencairan Dana dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Pelaksana	Laporan	2	2	100
	3) Jumlah Laporan Pemeliharaan Database dan Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Laporan	3	3	100
	4) Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	Laporan	2	2	100
	5) Jumlah Laporan Pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas	Laporan	6	6	100
	6) Jumlah Laporan Publikasi Kegiatan Pusat Pengelola Dana Pembiayaan Perumahan (BLU)	Laporan	6	6	100
	7) Jumlah Laporan Barang Milik Negara (BMN)	Laporan	1	1	100
	8) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	1	1	100
4	Layanan Internal (Overhead)	Layanan	1	1	100
	1) Jumlah Perangkat Pengelolaan Data dan Komuniikasi		1	1	100
	2) Jumlah Peralatan Fasilitas Perkantoran				
5	Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	100
	1) Biaya Gaji dan Tunjangan				
	2) Jumlah Layanan Perkantoran				

Kegiatan penyusunan laporan informasi, evaluasi pembinaan dan dukungan manajemen Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan merupakan kegiatan yang penting dilaksanakan oleh suatu organisasi yang modern dan menjamin akuntabilitas kinerjanya. Hasil dari kegiatan ini sangat diperlukan untuk menilai kinerja yang sudah dilaksanakan oleh organisasi, tidak saja

terkait hasil (*output*) namun harus dapat mengukur hingga manfaat dan dampak (*outcomes/impact*) yang terjadi dari pelaksanaan kebijakan/tindakan.

Disamping itu, guna menunjang aktivitas organisasi, perlu tersedia layanan perkantoran yang memadai, sehingga pelaksanaan aktifitas dan pencapaian terhadap target-target yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

Komponen dari sasaran 3 tersebut beserta target realisasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Keuangan yang meliputi:
 - a. Penyusunan Laporan Keuangan TA. 2019;
 - b. Pengawasan Intern – SPI.
- 2) Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja :
Laporan Kinerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
- 3) Verifikasi Permohonan Pencairan Dana dari LJK Pelaksana yang terdiri dari:
 - a. Layanan Pengujian atas Tagihan Pembiayaan Perumahan;
 - b. Peningkatan Mutu Pelayanan.
- 4) Pemeliharaan Data Base dan Teknologi Informasi yang Terintegrasi, yang terdiri dari:
 - a. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen PPDPP;
 - b. Pengelolaan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Unit Kerja Direktur Operasi PPDPP;
 - c. Koordinasi Pemeliharaan dan Pendayagunaan Database PPDPP Tahun 2019;
 - d. Pengembangan Teknologi Informasi PPDPP.
- 5) Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan, terdiri dari:
 - a. Evaluasi Penyelesaian Tagihan Dana FLPP;
 - b. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Dana FLPP;
 - c. Penyelenggaraan Kegiatan Dewan Pengawas PPDPP.
- 6) Pemenuhan SDM yang Berkualitas, meliputi kegiatan:
 - a. Manajemen Pengelolaan SDM PPDPP.
 - b. Peningkatan Kapasitas SDM.
 - c. Reviu Analisa Jabatan dan Penyusunan uraian Jabatan PPDPP.

- 7) Publikasi Kegiatan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan, yang meliputi kegiatan:
 - a. Penyebaran Informasi Melalui Media Cetak dan Media Elektronik;
 - b. Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan;
 - c. Layanan Hotline Tahun 2019;
 - d. Reviu Film 2019.
- 8) Penyusunan Laporan BMN, yang terdiri dari:
 - a. Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN);
- 9) Layanan Internal (Overhead):
 - a. Pengadaan Perangkat Pengelolaan Data dan Komunikasi.
 - b. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.
- 10) Layanan Perkantoran:
 - a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai;
 - b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja untuk sasaran 3 yang terdiri dari penyusunan Layanan Informasi, Evaluasi, Pembinaan dan Dukungan Manajemen Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan sudah mencapai target 31 laporan. Untuk komponen verifikasi permohonan pencairan dana dari LJK pelaksana mencapai 77.835 unit dari target 68.858 unit dan dituangkan dalam 2 laporan.

Capaian kinerja sasaran program pengembangan pembiayaan perumahan BA.033.08 mencapai target yaitu 100 %.

B. Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok.

1. Sasaran 1 : Bantuan pembiayaan perumahan ke bank pelaksana untuk rumah tangga berpenghasilan rendah.

Target kinerja penyaluran bantuan pembiayaan perumahan ke Bank pelaksana untuk rumah tangga berpenghasilan rendah yang berasal dari DIPA TA 2019 maupun bantuan pembiayaan perumahan yang berasal dari proyeksi pengembalian pokok yang di terima sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebesar 77.835 unit dari target 68.858 atau mencapai 113,04% dengan nilai FLPP sebesar Rp. 7.545.288.389.505 dari proyeksi dana yang tersedia sebesar Rp. 7.100.000.000.000,- atau mencapai 106,27%. Akumulasi secara total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 sampai dengan Akhir tahun 2019 sebanyak 655.602 unit dengan nilai FLPP sebesar Rp. 44.366.000.000.000,-.

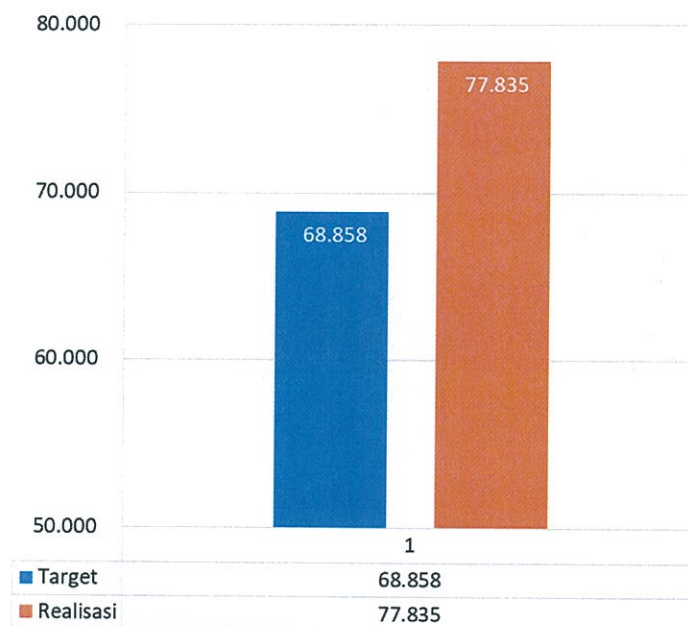
Pencapaian Perjanjian Kinerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan tahun 2019 dalam rangka penyaluran bantuan pembiayaan perumahan dapat dilihat pada tabel Capaian Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 4.4.
Capaian Kinerja Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok Tahun 2019.

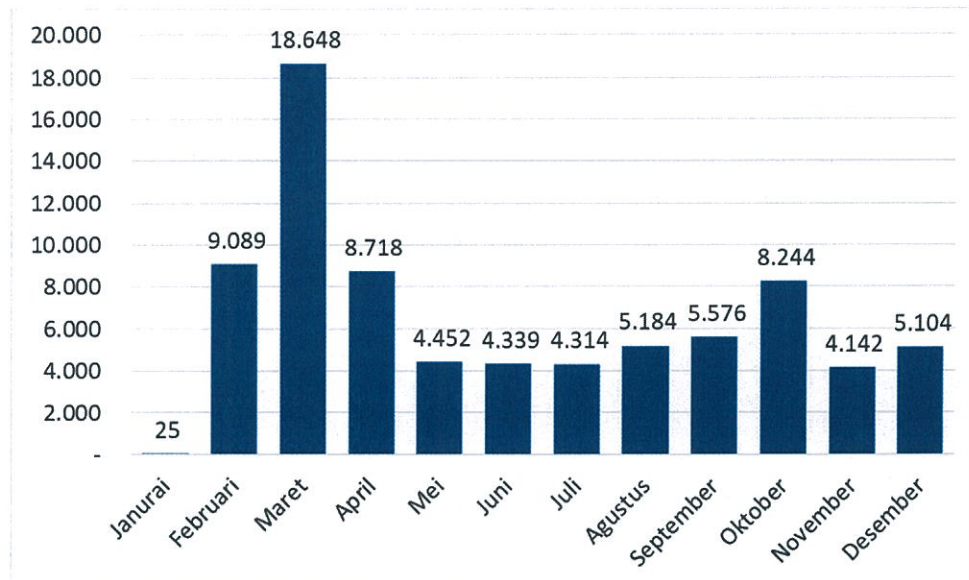
No.	Sasaran Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1) Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok					
1	Bantuan Pembiayaan Perumahan ke Bank Pelaksana untuk rumah tangga berpenghasilan rendah yang berasal dari DIPA TA 2019	Unit Rumah	68.858	77.835	113,04
2	Bantuan Pembiayaan Perumahan yang berasal dari Proyeksi pengembalian pokok yang diterima sampai dengan akhir tahun 2019				

Target dan Realisasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2019 berdasarkan Jumlah Unit Rumah dapat dilihat pada Grafik 4.1. Sedangkan Target dan Realisasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2019 berdasarkan Jumlah Unit Rumah per Bulan dapat dilihat pada Grafik 4.2.

Grafik 4.1.
Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2019 berdasarkan Target dan Realisasi.



Grafik 4.2.
Realisasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan
Tahun 2019 Per Bulan



Penyaluran bantuan pembiayaan perumahan tahun 2019 berdasarkan jumlah unit rumah mulai meningkat pada bulan Februari sampai dengan Desember, hal ini disebabkan karena dana DIPA sudah bisa direalisasikan sejak bulan Februari, sedangkan pada bulan Januari hanya menggunakan dana Saldo awal dan pengembalian pokok pada bulan Desember tahun 2019.

C. Dana Investasi PPDPP.

Sasaran I : Penyaluran Dana FLPP.

Untuk mewujudkan visi “MENJADI LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN PENGELOLA DANA YANG PROFESIONAL DAN HANDAL DALAM MENDUKUNG PEMENUHAN KEBUTUHAN PERUMAHAN BAGI RAKYAT”. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan selain mengadakan perjanjian kinerja dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan juga mengadakan kontrak kinerja dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan target dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Capaian Program Kinerja Tahun 2019.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pencapaian Ketetapan Sasaran Penyaluran FLPP	Presentase rumah yang dihuni MBR setelah 1 (satu) tahun sejak penandatanganan akad	100 %	100 %	100 %
2	Penyaluran Dana Kelolaan	Realisasi jumlah dana kelolaan tersalurkan kepada MBR dalam bentuk KPR FLPP dalam unit rumah	68,858 Unit	77,835 Unit	113,04 %
3	Pendapatan Layanan dan Non Layanan	Realisasi PNBPU BLU dari pendapatan layanan dan pendapatan non layanan	299 Miliar	319,6 Miliar	106,90 %
4	Pengembangan Sistem Informasi BLU	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	80 %	80 %	100 %
5	Pengembangan sistem BLU	Presentasi penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100 %	100 %	100 %

Program kinerja tersebut diajukan dalam rangka mendukung misi PPDPP yaitu :

1. Memberikan layanan penyaluran FLPP yang unggul dan tepat sasaran;
2. Mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan dana bergulir untuk mendukung kesinambungan pembiayaan perumahan rakyat;
3. Mengembangkan dan mengoptimalkan dukungan teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas layanan FLPP dan pengelolaan dana;
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui penerapan prinsip tata kelola organisasi yang baik dengan dukungan SDM yang profesional dan berintegritas.

Penilaian terhadap kontrak kinerja akan dilakukan oleh Direktorat PPK BLU Kementerian Keuangan dengan formula penilaian sesuai manual kontrak kinerja.

Penyusunan rencana kegiatan mempertimbangkan pada aspek prioritas untuk pengelolaan FLPP sebagaimana dituangkan dalam Kerangka Ekonomi Makro Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF 2019) mencakup:

1. Arah kebijakan pembiayaan investasi:
 - Mendukung peningkatan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan tempat tinggal.
 - Meningkatkan efektifitas program pembiayaan pemilikan rumah yang layak dengan harga terjangkau dan tepat sasaran melalui peningkatan dana bergulir untuk program FLPP.
2. Sasaran output atas Dana Bergulir pada BLU-PPDPP:
 - kebijakan skema kredit untuk MBR yang mempunyai penghasilan tidak tetap.

- menyempurnakan kebijakan skema rumah susun untuk pemenuhan hunian perkotaan.
 - meningkatkan sosialisasi kebijakan program FLPP kepada masyarakat dan Bank pelaksana.
3. Potensi risiko dalam penyaluran dana FLPP :
 - ketidaktepatan sasaran pemberian KPR–FLPP (baik dalam proses seleksi, pemanfaatan rumah, maupun kelengkapan bangunan rumah).
 - ketidaksesuaian antara kebutuhan perumahan MBR dengan ketersediaan perumahan MBR pada masing-masing daerah.
 4. Mitigasi risiko yang dilakukan pemerintah:
 - Pemerintah memberikan penugasan kepada Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) untuk menyalurkan FLPP bagi MBR.
 - Dukungan pembiayaan sekunder oleh PT SMF (Persero).
 - Perluasan manfaat oleh BPJS Ketenagakerjaan.
 - Rencana pemanfaatan dana Bapertarum PNS dan PT Taspen (Persero).
 5. Agar program pembiayaan tepat sasaran, salah satu langkah mitigasi risiko adalah menetapkan kriteria-kriteria debitur yang dapat memanfaatkan KPR-FLPP. Lebih lanjut, BLU PPDPP akan memeriksa apakah pemohon KPR-FLPP sesuai dengan kategori debitur MBR yang dapat memanfaatkan KPR dengan bunga 5 persen. Kegiatan ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya salah sasaran penyaluran kredit KPR-FLPP.
 6. Selain itu, pada Tahun 2018, dilakukan upaya melibatkan peran pemda untuk memastikan calon penerima FLPP sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan untuk memitigasi agar terdapat kesesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan perumahan MBR di seluruh wilayah Indonesia diperlukan pemetaan yang akurat.

4.2. PERBANDINGAN KINERJA ORGANISASI.

Kinerja penyaluran dana FLPP sampai dengan 31 Desember 2018 sejumlah 57.939 unit atau mencapai 98,85% dari target sejumlah 58.612 unit, dengan nilai FLPP sebesar Rp.5.890.000.000.000,- atau mencapai 97,29% dari target sebesar Rp. 6.050.000.000.000,-. Sedangkan penyaluran dana FLPP sampai dengan 31 Desember 2019 sejumlah 77.835 unit dari target 68.858 atau mencapai 113,04% dengan nilai FLPP sebesar Rp.7.545.288.389.505,- dari target sebesar Rp. 7.100.000.000.000,- atau mencapai 106,27%. Akumulasi secara total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak 655.602 unit dengan nilai FLPP sebesar Rp.44.366.000.000.000,-.

Perbandingan realisasi Pengelolaan Dana Bergulir FLPP dan Pengembalian Pokok tahun 2018 dan 2019 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.6.
Kinerja Tahun 2019 dan 2018 Untuk Program Investasi
Pemerintah (BA.999.03).

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja 2019			Capaian Kinerja 2018		
			Target Porsi	Realisasi	%	Target Porsi	Realisasi	%
Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok								
1	Bantuan Pembiayaan Perumahan ke Bank Pelaksana untuk rumah tangga berpenghasilan rendah yang berasal dari DIPA TA 2018	Unit Rumah/ Rusun	68.858	77.835	113,04	58.612	57.939	98,85
2	Bantuan Pembiayaan Perumahan yang berasal dari Proyeksi pengembalian pokok yang diterima sampai dengan akhir tahun 2018							
	TOTAL		68.858	77.835	113,04	58.612	57.939	98,85

Sedangkan perbandingan kinerja dukungan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan tahun 2018 dan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.7.
Perbandingan Kinerja Tahun 2019 – 2018 Untuk Operasional
PPDPP Tahun 2019 (BA.033.08).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pencapaian Kinerja 2019			Pencapaian Kinerja 2018		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan									
1	Layanan Promosi, Perencanaan dan Bantuan Hukum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU)	1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Promosi	Dokumen	14	14	100,00	7	5	71,43
		2 Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	Dokumen	9	9	100,00	2	2	100,00
		3 Jumlah Dokumen Legal dan Bantuan Hukum	Dokumen	8	8	100,00	28	27	96,43
2	Layanan Kerjasama dan Rekonsiliasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK)	4 Jumlah Lembaga LJK yang bekerjasama dengan Pusat Pengelola Dana Pembiayaan	Lembaga	53	39	73,58	49	43	87,76
		5 Jumlah Rekonsiliasi dengan LJK	Lembaga	31	45	145,16	20	44	220,00

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pencapaian Kinerja 2019			Pencapaian Kinerja 2018		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan									
3	Laporan Informasi, Evaluasi, Pembinaan dan Dukungan Manajemen Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	6 Jumlah Laporan Keuangan	Dokumen	10	10	100,00	2	2	100,00
		7 Jumlah Verifikasi Permohonan Pencairan Dana dari LJK Pelaksana	Unit	1	1	100,00	1	1	100,00
		8 Jumlah Laporan Pemeliharaan Data Base dan Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Dokumen	3	3	100,00	2	2	100,00
		9 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	Dokumen	2	2	100,00	2	2	100,00
		10 Jumlah Laporan Pemenuhan SDM yang Berkualitas	Dokumen	12	12	100,00	1	1	100,00
		11 Jumlah Laporan Publikasi Kegiatan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan	Dokumen	1	1	100,00	1	1	100,00
		12 Jumlah Laporan BMN	Dokumen	1	1	100,00	2	2	100,00
		13 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Dokumen	1	1	100,00	1	1	100,00
4	Layanan Internal (Overhead)	14 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Layanan	1	1	100,00	1	1	100,00
5	Layanan Perkantoran	15 Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	12	12	100,00	12	12	100,00

Untuk mendukung operasional sehari-hari PPDPP menggunakan dana yang berasal dari pendapatan atas tarif layanan serta hasil pengelolaan kas atas dana yang belum digulirkan kepada MBR (*idle cash*). Akumulasi pendapatan operasional PPDPP sejak tahun 2010 sampai dengan Desember 2019 adalah sebesar Rp1.913.501.827.505,-. Sedangkan pendapatan sejak 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp319.637.502.920,00 atau mencapai 129,93 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp246.000.000.000,-

Realisasi PNBP lebih banyak dari target yang diperkirakan karena terdapat kendala pada penyaluran FLPP di awal tahun 2019 sehingga pendapatan Non Layanan meningkat cukup tinggi.

Tabel 4.8
Rincian Pendapatan Tahun 2019 dan 2018.

No.	Uraian Akun Pendapatan	Tahun 2019			Tahun 2018		
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Pendapatan Jasa Layanan PPDPP (tarif)	150.960.000.000	151.156.360.036	100,13	150.000.000.000	117.613.626.790	78,41
A	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	147.000.000.000	128.767.291.251	87,60	138.000.000.000	100.702.711.256	72,97
B	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	3.960.000.000	22.389.068.785	565,38	12.000.000.000	16.910.915.534	140,92
2	Pendapatan PPDPP Lainnya (jasa giro dan bunga deposito)	95.040.000.000	168.481.142.885	177,27	96.000.000.000	226.495.763.301	235,93
	Pendapatan Jasa Perbankan PPDPP	95.040.000.000	168.481.142.885	177,27	96.000.000.000	226.495.763.301	235,93
Total Pendapatan PPDPP		246.000.000.000	319.637.502.920	129,93	246.000.000.000	344.109.390.091	139,88

Data : 31 Desember 2019

Sesuai dengan pedoman penilaian kinerja yang dibuat oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU Kementerian Keuangan selaku pembina Satuan Kerja BLU, satuan kerja BLU untuk dana bergulir dikelompokkan sebagai BLU bidang pengelola dana khusus. Perkembangan pengelolaan dana FLPP oleh BLU PPDPP sejak tahun 2010 hingga 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Tabel 4.9 di bawah ini.

Tabel 4.9
Perkembangan Pengelolaan Dana s.d 31 Desember 2019

Tahun	DIPA	Penyaluran FLPP		Pengembalian Pokok (Rp)
		Unit	Rp	
2010	2.683.049.000.000	7.959	242.656.944.516	43.789.900
2011	3.571.600.000.000	109.592	3.688.272.535.411	58.100.576.876
2012	4.709.253.000.000	64.785	2.587.256.538.729	208.986.757.420
2013	1.209.253.000.000	102.714	5.363.161.269.150	437.925.189.962
2014	3.000.000.000.000	76.057	4.655.625.834.824	700.004.741.057
2015	5.106.300.000.000	76.489	6.055.232.493.208	1.003.975.167.544
2016	4.295.659.000.000	58.469	5.627.538.999.307	1.262.801.035.360
2017	3.100.000.000.000	23.763	2.706.624.492.776	1.628.941.076.817
2018	2.180.000.000.000	57.939	5.895.206.726.677	2.057.606.606.829
2019	5.200.000.000.000	77.835	7.545.288.389.505	2.604.401.404.831
TOTAL	35.055.114.000.000	655.602	44.366.864.224.103	9.962.786.346.596

*) data sampai dengan 31 Desember 2019

Untuk meningkatkan *leverage* dana FLPP dalam membantu kebutuhan MBR terhadap KPR perlu dilakukan upaya-upaya untuk percepatan *turn over* dana FLPP dan menambah porsi pembiayaan.

Dalam tahun 2019, dalam rangka menurunkan porsi pembiayaan Pemerintah, dilakukan kerjasama untuk pemanfaatan/sinergi pembiayaan dana jangka panjang lain dengan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

4.3. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019.

A. Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan.

Anggaran Operasional PPDPP tahun 2019 untuk program pengembangan pembiayaan perumahan berdasarkan alokasi belanja tahun 2019 sebesar Rp67.750.000.000,- (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan realisasi mencapai Rp. 66.420.000.000,- atau 98,05% dari DIPA.

Tabel 4.10.

Realisasi Anggaran Operasional PPDPP Tahun 2019 (BA.033).

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran Tahun 2019 (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan					
1	Layanan Promosi, Perencanaan dan Bantuan Hukum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU)	1). Jumlah Laporan Pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi	4.900.000.000	4.867.362.656	99,33
		2). Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	1.882.120.000	1.433.818.436	76,18
		3). Jumlah Dokumen Legal dan Bantuan Hukum	289.630.000	252.664.363	87,24
2	Layanan Kerjasama dan Rekonsiliasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK)	1). Jumlah Lembaga LJK yang bekerjasama dengan Pusat Pengelola Dana Pembiayaan	1.700.000.000	1.632.543.077	96,03
		2). Jumlah Rekonsiliasi dengan LJK	2.424.000.000	2.397.534.995	98,91

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran Tahun 2019 (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan					
3	Laporan Informasi, Evaluasi, Pembinaan dan Dukungan Manajemen Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	1). Jumlah Laporan Keuangan	2.097.766.000	1.984.308.040	94,59
		2). Jumlah Verifikasi Permohonan Pencairan Dana dari LJK Pelaksana	1.530.680.000	1.456.646.441	95,16
		3). Jumlah Laporan Pemeliharaan Data Base dan Teknologi Informasi yang Terintegrasi	3.440.070.000	3.419.510.589	99,40
		4). Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	2.572.872.000	2.569.597.851	99,87
		5). Jumlah Laporan Pemenuhan SDM yang Berkualitas	2.177.232.000	2.172.777.382	99,80
		6). Jumlah Laporan Publikasi Kegiatan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan	1.381.893.000	1.378.626.250	99,76
		7). Jumlah Laporan BMN	141.039.000	137.809.500	97,71
		1). Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	51.626.000	48.277.700	93,51
4	Layanan Internal (Overhead)	1). Jumlah Layanan Pengelolaan Data dan Komunikasi	756.800.000	733.227.000	96,89
		2). Jumlah Layanan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	76.200.000	65.989.000	86,60
5	Layanan Perkantoran	1). Biaya Gaji dan Tunjangan	24.184.072.000	23.883.545.062	98,76
		2). Jumlah Layanan Perkantoran	18.144.000.000	17.995.175.485	99,18

B. Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok.

Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019, dialokasikan anggaran FLPP sejumlah Rp. 5.200.000.000.000,- dengan target yang tercantum pada DIPA sebanyak 68.858 unit KPR Sejahtera. Anggaran dana FLPP yang tersedia pada tahun 2019 adalah Rp. 7.100.000.000.000,- yang terdiri dari DIPA sebesar Rp. 5.200.000.000.000,- proyeksi pengembalian pokok sebesar Rp. 2.382.312.000.000,- dan saldo awal sebesar Rp. 391.000.000.000,- Jumlah dana tersebut ditargetkan dapat membiayai bantuan perumahan untuk 68.858 unit KPR Sejahtera.

Realisasi penyaluran dana FLPP sampai dengan 31 Desember 2019 sebanyak 77.835 unit dari target 68.858 atau mencapai 113,04% dengan nilai FLPP sebesar Rp.7.545.288.389.505,- dari proyeksi pendanaan sebesar Rp. 7.100.000.000.000,- atau mencapai 106,27%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.11.
Realisasi Anggaran Dana Investasi PPDPP Tahun 2019 (BA.033).

No.	Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2019 (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok				
1	Bantuan Pembiayaan Perumahan ke Bank Pelaksana untuk rumah tangga berpenghasilan rendah yang berasal dari DIPA TA 2019	7.100.000.000.000	7.545.288.389.505	106,27
2	Bantuan Pembiayaan Perumahan yang berasal dari Proyeksi pengembalian pokok yang diterima sampai dengan akhir tahun 2019			

Tabel 4.12.
Realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
berdasarkan Provinsi Tahun 2019.

NO	PROVINSI	REALISASI S.D DESEMBER 2019		%
		UNIT	NILAI FLPP	
1	JAWA BARAT	16.480	1.640.664.409.410	21,17
2	SUMATERA UTARA	6.361	579.489.966.750	8,17
3	SUMATERA SELATAN	5.235	483.982.225.875	6,73
4	SULAWESI SELATAN	4.885	472.698.930.113	6,28
5	JAWA TIMUR	4.445	402.939.602.049	5,71
6	KALIMANTAN BARAT	4.218	419.943.986.484	5,42
7	BANTEN	4.112	397.476.749.181	5,28
8	RIAU	3.605	330.672.343.500	4,63
9	KALIMANTAN SELATAN	3.533	354.431.998.500	4,54
10	JAMBI	2.933	269.964.390.891	3,77
11	JAWA TENGAH	2.818	257.288.223.494	3,62
12	SULAWESI TENGGARA	2.157	209.347.965.115	2,77
13	NUSA TENGGARA BARAT	1.743	186.693.330.375	2,24
14	LAMPUNG	1.611	145.712.059.835	2,07
15	SULAWESI UTARA	1.550	150.482.513.220	1,99
16	SUMATERA BARAT	1.479	134.030.362.500	1,90
17	KALIMANTAN TENGAH	1.302	128.779.054.500	1,67
18	BENGKULU	1.060	94.622.077.500	1,36
19	KEPULAUAN RIAU	982	95.010.447.750	1,26
20	ACEH	948	87.387.074.250	1,22
21	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	873	85.341.743.250	1,12
22	KALIMANTAN TIMUR	841	85.846.687.500	1,08
23	PAPUA	781	113.366.191.500	1,00
24	SULAWESI BARAT	769	73.686.375.000	0,99
25	NUSA TENGGARA TIMUR	630	67.411.355.795	0,81
26	SULAWESI TENGAH	627	60.361.815.000	0,81
27	PAPUA BARAT	625	89.845.598.506	0,80
28	BALI	492	51.442.149.000	0,63
29	GORONTALO	367	35.503.702.500	0,47
30	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	134	12.824.400.000	0,17
31	DKI JAKARTA	89	12.909.938.913	0,11
32	KALIMANTAN UTARA	85	8.657.115.000	0,11
33	MALUKU UTARA	37	3.501.262.500	0,05
34	MALUKU	28	2.972.343.750	0,04
TOTAL		77.835	7.545.288.389.506	100,00

Kinerja FLPP Tahun 2019 per 31 Desember 2019 berdasarkan sebaran per provinsi diperoleh kinerja dengan sebaran tertinggi yaitu provinsi Jawa Barat sebanyak 16.480 unit (21,17%), provinsi Sumatera Utara sebanyak 6.361 unit (8,17%), Sumatera Selatan 5.235 unit (6,73%), provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 4.885 unit (6,28%), provinsi Jawa Timur sebanyak 4.445 unit (5,71%). Sebaran realisasi tersebut menunjukkan bahwa 5 (lima) provinsi tersebut merupakan pangsa pasar terbesar dalam penyaluran dana FLPP. Sedangkan realisasi terkecil dalam sebaran yaitu provinsi Maluku sebanyak 28 unit (0,04%).

4.4 Evaluasi Pencapaian Kinerja.

Penilaian Kinerja dilakukan setiap tahun di lingkungan kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan. Evaluasi pencapaian kinerja dilakukan berdasarkan data indikator kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) BLU - PPDPP. Sedangkan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Renstra BLU - PPDPP tidak ada data *monitoring, tracking* dan pencapaiannya.

Evaluasi pencapaian kinerja BLU – PPDPP sebaiknya mencakup hasil cascading dari Kementerian PUPR yang berasal dari Strategi Nasional. Dan juga mengakomodir hasil Rencana Strategi Bisnis BLU – PPDPP. Sehingga seluruh perspective (*financial perspective, customer perspective, internal business process perspective, dan learning and growth perspective*) untuk pelaksanaan program kerja dan penetapan indikator dan target kinerja dapat terukur, dalam rangka mencapai tujuan strategis organisasi.

Untuk menggambarkan pencapaian kinerja BLU – PPDPP dalam kurun waktu 2015-2019, maka berikut ini adalah tabel Hasil Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2015 – 2019.

Tabel 4.13.
Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan
Tahun 2015-2019.

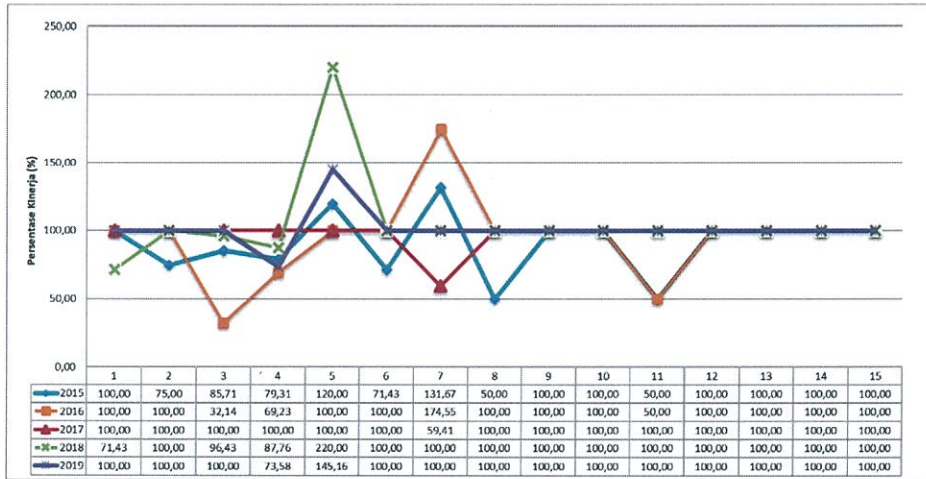
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pencapaian Kinerja 2015			Pencapaian Kinerja 2016			Pencapaian Kinerja 2017			Pencapaian Kinerja 2018			Pencapaian Kinerja 2019		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan																		
1	Layanan Promosi, Perencanaan dan Bantuan Hukum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU)	1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Promosi	Dokumen	1	1	100,00	10	10	100,00	11	11	100,00	7	5	71,43	14	14	100,00
		2 Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	Dokumen	4	3	75,00	2	2	100,00	11	11	100,00	2	2	100,00	9	9	100,00
		3 Jumlah Dokumen Legal dan Bantuan Hukum	Dokumen	28	24	85,71	28	9	32,14	13	13	100,00	28	27	96,43	8	8	100,00
2	Layanan Kerjasama dan Rekonsiliasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK)	4 Jumlah Lembaga LJK yang bekerjasama dengn Pusat Pengelola Dana Pembiayaan	Lembaga	29	23	79,31	39	27	69,23	33	33	100,00	49	43	87,76	53	39	73,58
		5 Jumlah Rekonsiliasi dengan LJK	Lembaga	20	24	120,00	20	20	100,00	36	36	100,00	20	44	220,00	31	45	145,16
3	Laporan Informasi, Evaluasi, Pembinaan dan Dukungan Manajemen Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	6 Jumlah Laporan Keuangan	Dokumen	14	10	71,43	9	9	100,00	13	13	100,00	2	2	100,00	10	10	100,00
		7 Jumlah Verifikasi Permohonan Pencairan Dana dari LJK Pelaksana	Unit	58.090	76.489	131,67	87.390	152.537	174,55	40.000	23.763	59,41	1	1	100,00	1	1	100,00
		8 Jumlah Laporan Pemeliharaan Data Base dan Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Dokumen	2	1	50,00	2	2	100,00	9	9	100,00	2	2	100,00	3	3	100,00
		9 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	Dokumen	2	2	100,00	2	2	100,00	4	4	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00
		10 Jumlah Laporan Pemenuhan SDM yang Berkualitas	Dokumen	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	12	12	100,00
		11 Jumlah Laporan Publikasi Kegiatan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan	Dokumen	2	1	50,00	2	1	50,00	2	2	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00
		12 Jumlah Laporan BMN	Dokumen	3	3	100,00	13	13	100,00	1	1	100,00	2	2	100,00	1	1	100,00
	13 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Dokumen	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	
4	Layanan Internal (Overhead)	14 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Layanan	70	70	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00
5	Layanan Perkantoran	15 Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	12	12	100,00	12	12	100,00	12	12	100,00	12	12	100,00	12	12	100,00

Berdasarkan tabel diatas terdapat 15 indikator kinerja yang terkait dengan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2015-2019, yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah laporan pelaksanaan promosi dan sosialisasi.
2. Jumlah dokumen perencanaan anggaran Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).
3. Jumlah dokumen legal dan bantuan hukum.
4. Jumlah lembaga LJK yang bekerjasama dengan PPDPP.
5. Jumlah rekonsiliasi dengan LJK.
6. Jumlah Laporan Keuangan.
7. Jumlah Verifikasi permohonan pencairan dana dari LJK pelaksana.
8. Jumlah Laporan pemeliharaan Data Base dan Teknologi Informasi yang terintegrasi.
9. Jumlah Laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan.
10. Jumlah Laporan pemenuhan SDM yang berkualitas.
11. Jumlah Laporan Publikasi kegiatan PPDPP.
12. Jumlah Laporan BMN.
13. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja.
14. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, serta pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran.
15. Jumlah Layanan perkantoran.

Target, realisasi dan prosentase pencapaian dari 15 Indikator Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2015-2019, dapat dilihat pada Grafik yang terdapat pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2.

Gambar 4.1
Persentase Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2015-2019.



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa prosentase pencapaian target kinerja cenderung memiliki trend meningkat dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Pada tahun 2018 pencapaian indikator kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan hampir seluruhnya mencapai 100%, bahkan terdapat indikator kinerja yang mencapai target 200%. Kecuali untuk aspek indikator kinerja Jumlah Dokumen Legal dan Bantuan Hukum mencapai 96,43%, dan Jumlah Lembaga LJK yang bekerjasama dengan Pusat Pengelola Dana Pembiayaan mencapai 87,76%.

Berikut dibawah ini adalah tabel Kinerja Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok Tahun 2015 - 2019.

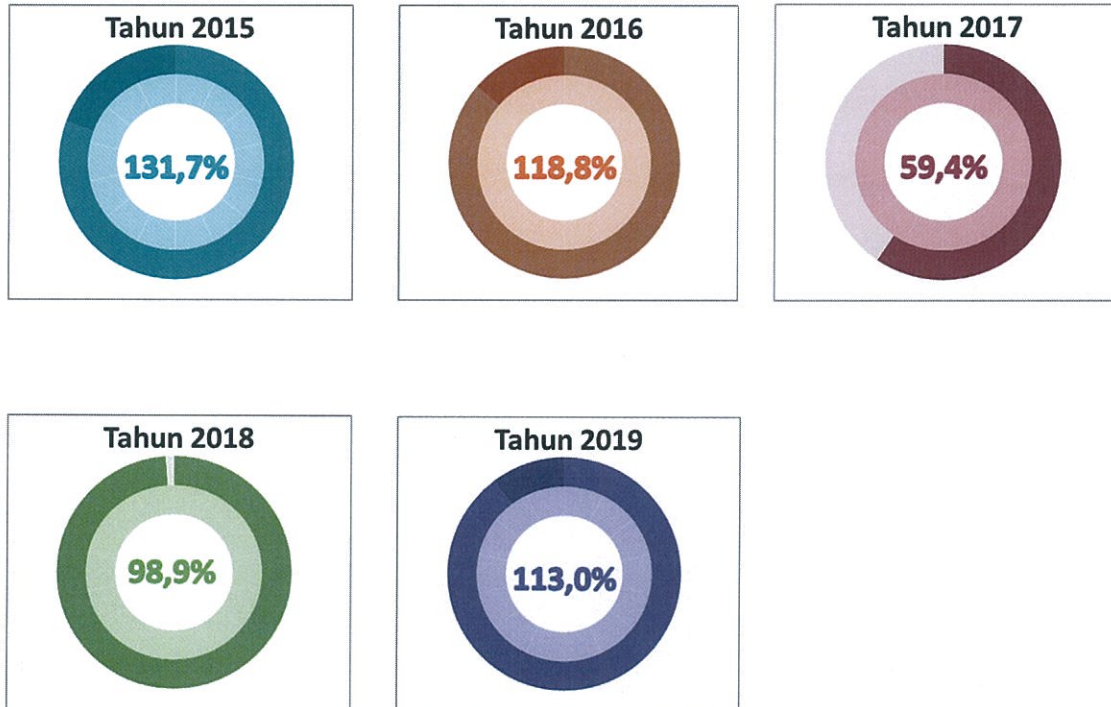
Tabel 4.14.
Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok Tahun 2015-2019.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja 2015			Capaian Kinerja 2016			Capaian Kinerja 2017			Capaian Kinerja 2018			Capaian Kinerja 2019		
			Target Porsi	Realisasi	%	Target Porsi	Realisasi	%	Target Porsi	Realisasi	%	Target Porsi	Realisasi	%	Target Porsi	Realisasi	%
Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok																	
1	Bantuan Pembiayaan Perumahan ke Bank Pelaksana untuk rumah tangga berpenghasilan rendah yang berasal dari DIP A	Unit Rumah/ Rusun	58.090	76.489	131,67	49.204	58.469	118,83	40.000	23.763	59,41	58.612	57.939	98,85	68.858	77.835	113,04
2	Bantuan Pembiayaan Perumahan yang berasal dari Proyeksi pengembalian pokok yang diterima sampai dengan akhir tahun																
TOTAL				58.090	76.489	131,67	49.204	58.469	118,83	40.000	23.763	59,41	58.612	57.939	98,85	68.858	77.835

Persentase hasil penilaian kinerja Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok Tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada gambar 4.2 dan dan 4.3 berikut.

Gambar 4.2

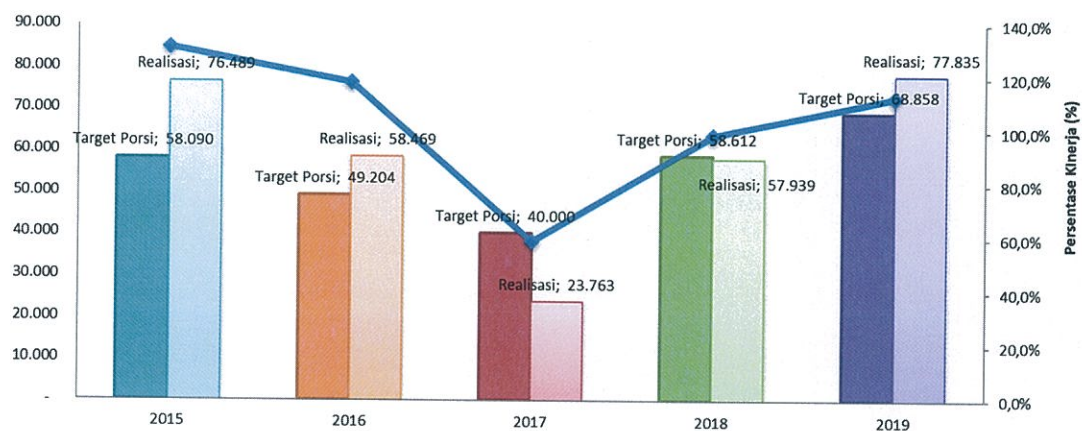
Persentase Kinerja Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok Tahun 2015-2019.



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase kinerja Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Tahun 2015 - 2019, mengalami pencapaian lebih dari 100% di tahun 2015 dan 2016, kemudian mencapai titik terendah pada tahun 2017, dan kembali naik di tahun 2018.

Gambar 4.3

Target, realisasi, dan Persentase Kinerja Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok Tahun 2015-2019.



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pencapaian target kinerja Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok Tahun 2015 – 2019 berdasarkan pagu anggaran dan realisasi anggaran mengalami penurunan pada tahun 2017, dikarenakan DIPA pada terlambat terbit dan BTN sebagai Bank mitra terbesar memilih untuk tidak menjadi mitra pada tahun 2017. Walaupun dengan target yang lebih kecil dari pada tahun sebelumnya, persentase pencapaian kinerja kembali naik di tahun 2018.

4.5 Evaluasi Pencapaian Kinerja Keuangan.

Pencapaian kinerja keuangan di lingkungan kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan sangat krusial dan dilakukan setiap tahun, untuk menjadi bahan evaluasi dalam perkembangan organisasi kedepan. Berikut dibawah ini adalah tabel Realisasi Anggaran Operasional PPDPP Tahun 2015 – 2019.

TABEL 4.15.

Realisasi Anggaran Operasional PPDPP Tahun 2015-2019.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2015				2016				2017				2018				2019			
			Pagu Anggaran (dalam juta Rupiah)	Realisasi Anggaran (dalam juta rupiah)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (dalam juta Rupiah)	Realisasi Anggaran (dalam juta rupiah)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (dalam juta Rupiah)	Realisasi Anggaran (dalam juta rupiah)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (dalam juta Rupiah)	Realisasi Anggaran (dalam juta rupiah)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (dalam juta Rupiah)	Realisasi Anggaran (dalam juta rupiah)	Capaian (%)					
Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan																						
A	Layanan Promosi, Perencanaan dan Bantuan Hukum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BW)	1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi	412.391.000	349.429.606	84,73	17.572.801.000	17.479.949.195	99,47	6.617.093.000	6.512.211.037	98,41	6.263.922.000	5.764.693.641	92,03	4.900.000.000	4.867.362.656	99,33					
		2 Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	1833.326.000	971.176.824	52,97	9.658.485.000	8.861.639.195	91,75	2.581.215.000	2.311.956.319	89,57	5.087.425.000	4.891.008.712	96,14	1.882.120.000	1.433.818.436	76,18					
		3 Jumlah Dokumen Legal dan Bantuan Hukum	393.640.000	241.616.000	61,38	1.525.211.000	1.175.312.852	77,06	297.109.000	270.228.100	90,95	246.702.000	106.526.400	43,18	289.630.000	252.664.363	87,24					
B	Layanan Kerjasama dan Rekonsiliasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK)	4 Jumlah Lembaga LJK yang bekerjasama dengan Pusat Pengelola Dana Pembiayaan	139.116.000	36.584.000	26,30	172.170.000	150.261.000	87,27	1.480.980.000	1.353.197.174	91,37	1.540.557.000	1.486.192.048	96,47	1.700.000.000	1.632.543.077	96,03					
		5 Jumlah Rekonsiliasi dengan LJK	309.513.000	208.034.088	67,21	925.902.000	860.387.075	92,92	8.514.820.000	6.729.812.796	79,04	1.598.811.000	1.372.038.739	85,82	2.424.000.000	2.397.534.995	98,91					

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2015				2016				2017				2018				2019			
			Pagu Anggaran (dalam juta Rupiah)	Realisasi Anggaran (dalam juta rupiah)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (dalam juta Rupiah)	Realisasi Anggaran (dalam juta rupiah)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (dalam juta Rupiah)	Realisasi Anggaran (dalam juta rupiah)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (dalam juta Rupiah)	Realisasi Anggaran (dalam juta rupiah)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (dalam juta Rupiah)	Realisasi Anggaran (dalam juta rupiah)	Capaian (%)					
Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan																						
C	Laporan Informasi, Evaluasi, Pembinaan dan Dukungan Manajemen Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	6	Jumlah Laporan Keuangan	558.629.000	256.100.000	45,84	1.688.556.000	1.115.335.300	96,27	2.468.899.000	1.851.399.998	75,01	1.501.723.000	1.281.019.666	85,30	2.097.766.000	1.984.308.040	94,59				
		7	Jumlah Verifikasi Pemohonan Pencairan Dana dari LJK Pelaksana	90.900.000			542.885.000	268.864.472	49,53	1.044.063.000	609.191014	58,35	700.000.000	536.937.034	76,71	1.530.680.000	1.456.646.441	95,16				
		8	Jumlah Laporan Pemeliharaan Data Base dan Teknologi Informasi yang Terintegrasi	534.576.000	366.108.000	68,49	3.879.701.000	3.465.842.754	89,33	6.681.617.000	5.924.030.654	88,66	2.149.720.000	1.850.524.399	86,08	3.440.070.000	3.419.510.589	99,40				
		9	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	3.785.929.000	2.176.528.021	57,49	1.706.003.000	1.292.353.649	75,75	5.030.771.000	3.159.059.905	62,79	4.465.060.000	4.203.773.789	94,15	2.572.872.000	2.569.597.851	99,87				
		10	Jumlah Laporan Pemenuhan SDM yang Berkualitas	1.193.120.000	661.098.593	55,41	1.971.633.000	1.916.255.122	97,19	1.363.384.000	1.163.107.013	85,31	2.200.547.000	2.184.291.657	99,26	2.177.232.000	2.172.777.382	99,80				
		11	Jumlah Laporan Publikasi Kegiatan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan	1.894.879.000	1.472.919.618	77,73	2.135.831.000	2.121.026.784	99,31	904.589.000	881.075.700	97,40	2.087.942.000	1.996.577.700	95,62	1.381.893.000	1.378.626.250	99,76				
		12	Jumlah Laporan BMN	485.360.000	82.352.500	16,87	996.289.000	878.204.226	88,15	168.664.000	163.993.000	97,23	203.078.000	192.110.000	94,60	110.139.000	107.809.500	97,71				
		13	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja				242.476.000	229.520.000	94,66	500.000.000	465.913.899	93,18	135.414.000	126.162.850	93,18	516.260.000	482.777.700	93,51				

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2015				2016				2017				2018				2019			
			Pagu Anggaran (dalam juta Rupiah)	Realisasi Anggaran (dalam juta rupiah)	Capaian (%)		Pagu Anggaran (dalam juta Rupiah)	Realisasi Anggaran (dalam juta rupiah)	Capaian (%)		Pagu Anggaran (dalam juta Rupiah)	Realisasi Anggaran (dalam juta rupiah)	Capaian (%)		Pagu Anggaran (dalam juta Rupiah)	Realisasi Anggaran (dalam juta rupiah)	Capaian (%)		Pagu Anggaran (dalam juta Rupiah)	Realisasi Anggaran (dalam juta rupiah)	Capaian (%)	
Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan																						
D	Layanan Internal (Overhead)	14 Jumlah Layanan Pengelolaan Data dan Komunikasi								399.300.000	334.400.000	83,75	5.118.850.000	4.324.328.000	84,48	756.800.000	733.227.000	96,89				
		15 Jumlah Layanan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	634.000.000	598.800.000	94,35	500.000.000	487.795.000	97,56	4.175.964.000	4.175.952.470	100,00	900.000.000	646.780.750	71,86	76.200.000	65.989.000	86,60					
E	Layanan Perkantoran	16 Biaya Gaji dan Tunjangan							15.333.791.000	12.554.136.818	81,87	19.853.400.000	17.421.089.908	87,75	24.184.072.000	23.883.545.062	98,76					
		17 Jumlah Layanan Perkantoran	10.350.682.000	6.723.244.772	64,95	32.183.294.000	24.636.655.483	76,55	17.609.678.000	17.569.710.757	99,77	23.666.279.000	21.974.063.986	92,85	18.144.000.000	17.995.175.485	99,18					

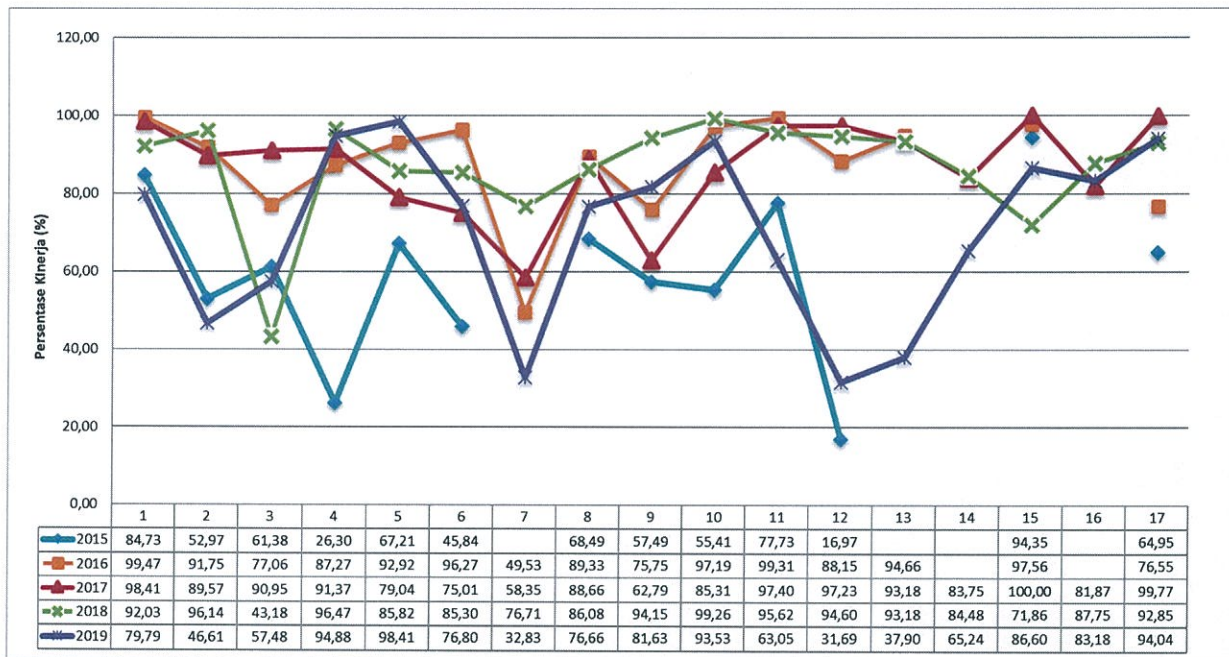
Berdasarkan tabel diatas terdapat 17 indikator kinerja yang terkait dengan Anggaran Operasional PPDPP Tahun 2015 – 2019, yaitu sebagai berikut :

1. Jumlah laporan pelaksanaan promosi dan sosialisasi.
2. Jumlah dokumen perencanaan anggaran Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).
3. Jumlah dokumen legal dan bantuan hukum.
4. Jumlah lembaga LJK yang bekerjasama dengan PPDPP.
5. Jumlah rekonsiliasi dengan LJK.
6. Jumlah Laporan Keuangan.
7. Jumlah Verifikasi permohonan pencairan dana dari LJK pelaksana.
8. Jumlah Laporan pemeliharaan Data Base dan Teknologi Informasi yang terintegrasi.
9. Jumlah Laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan.
10. Jumlah Laporan pemenuhan SDM yang berkualitas.
11. Jumlah Laporan Publikasi kegiatan PPDPP.
12. Jumlah Laporan BMN.
13. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja.
14. Jumlah Layanan pengelolaan data dan komunikasi.
15. Jumlah Layanan Peralatan dan fasilitas perkantoran.
16. Biaya gaji dan tunjangan.
17. Jumlah Layanan Perkantoran.

Target, realisasi dan persentase dari ke 17 Indikator Kinerja Anggaran Operasional PPDPP Tahun 2015 – 2019 untuk setiap indikator kinerja, dapat dilihat pada gambar 4.4 dan 4.5

Gambar 4.4

Persentase Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2015-2019



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa adanya kecenderungan peningkatan dalam pencapaian kinerja dukungan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan dari periode tahun 2015 sampai tahun 2019, hal tersebut dapat dilihat dari persentase pencapaian kinerja.

Berikut ini adalah dan tabel Realisasi Anggaran Dana Investasi PPDPP Tahun 2015 - 2019.

Tabel 4.16.

Realisasi Anggaran Dana Investasi PPDPP Tahun 2015-2019.

No.	Sasaran Kegiatan	2015			2016		
		Pagu Anggaran (dalam milyar Rp)	Realisasi Anggaran (dalam milyar Rp)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (dalam milyar Rp)	Realisasi Anggaran (dalam milyarRp)	Capaian (%)
Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok							
1	Bantuan Pembiayaan Perumahan ke Bank Pelaksana untuk rumah tangga berpenghasilan rendah yang berasal dari DIPA	5.106	6.055	118,59	5.196	5.628	108,31
2	Bantuan Pembiayaan Perumahan yang berasal dari Proyeksi pengembalian pokok yang diterima sampai dengan akhir tahun						

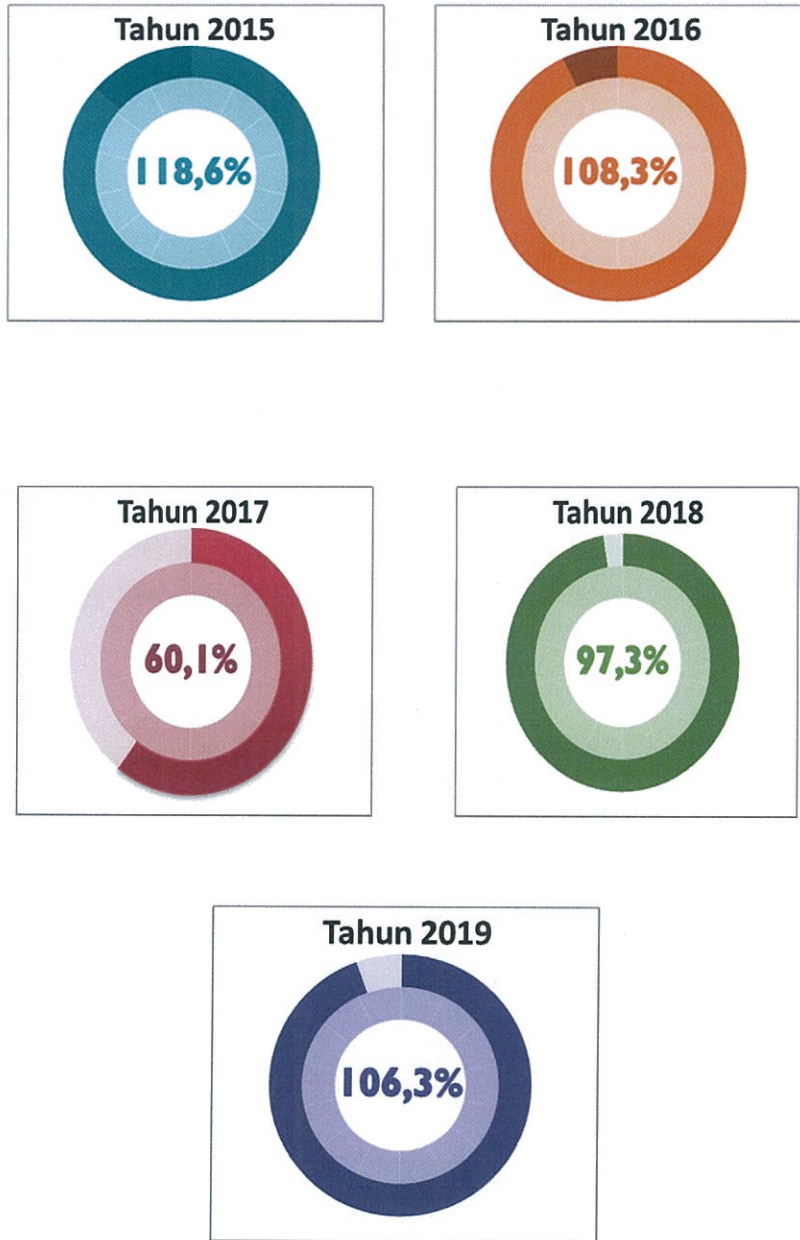
No.	Sasaran Kegiatan	2017			2018		
		Pagu Anggaran (dalam milyar Rp)	Realisasi Anggaran (dalam milyar Rp)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (dalam milyar Rp)	Realisasi Anggaran (dalam milyar Rp)	Capaian (%)
Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok							
1	Bantuan Pembiayaan Perumahan ke Bank Pelaksana untuk rumah tangga berpenghasilan rendah yang berasal dari DIPA	4.500	2.707	60,16	6.060	5.895	97,28
2	Bantuan Pembiayaan Perumahan yang berasal dari Proyeksi pengembalian pokok yang diterima sampai dengan akhir tahun						

No.	Sasaran Kegiatan	2019		
		Pagu Anggaran (dalam milyar Rp)	Realisasi Anggaran (milyar Rp)	Capaian (%)
Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok				
1	Bantuan Pembiayaan Perumahan ke Bank Pelaksana untuk rumah tangga berpenghasilan rendah yang berasal dari DIPA	7.100	7.545	106,27
2	Bantuan Pembiayaan Perumahan yang berasal dari Proyeksi pengembalian pokok yang diterima sampai dengan akhir tahun			

Persentase hasil Realisasi Anggaran Dana Investasi PPDPP Tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.5.

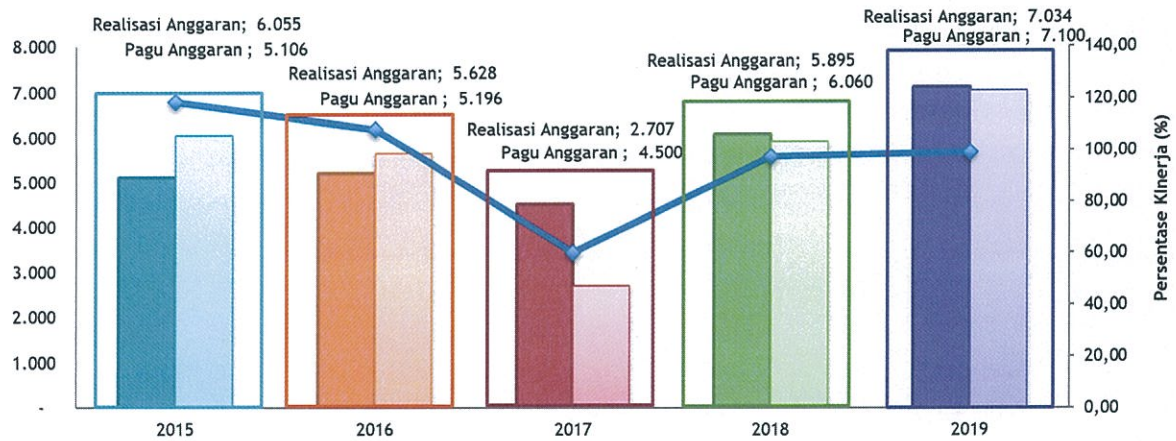
Persentase Realisasi Anggaran Dana Investasi PPDPP Tahun 2015-2019.



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa persentase pencapaian target Realisasi Anggaran Dana Investasi PPDPP Tahun 2015 - 2019, mengalami pencapaian lebih dari 100% di tahun 2015 dan 2016, kemudian mencapai titik terendah pada tahun 2017, dan kembali naik di tahun 2018 dan tahun 2019.

Gambar 4.6

Target, Realisasi dan Persentase Kinerja Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok Tahun 2015-2019.



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pencapaian target Realisasi Anggaran Dana Investasi PPDPP Tahun 2015 - 2019 berdasarkan pagu anggaran dan realisasi anggaran, mengalami penurunan pada tahun 2017 walaupun dengan target yang lebih kecil dari pada tahun sebelumnya. Pagu anggaran dan realisasi anggaran kembali naik di tahun 2018 dan tahun 2019.

Tabel 4.17.

Analisis Pencapaian Kinerja dan Keuangan BLU PPDPP Tahun 2015-2019.

No	Periode (Tahun).	Analisis Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan.	Analisis Kinerja Keuangan.	Isu/Permasalahan.	Tindak Lanjut.
1.	2019.	<p>Rata rata pencapaian kinerja adalah Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan di tahun 2019 adalah memuaskan dengan nilai 101,25%.</p> <p>Rincian pencapaian tiap indikator kinerja termasuk kategori memuaskan ($\geq 90\%$), tetapi ada satu indikator kinerja memiliki nilai pencapaian kurang memuaskan (70% - 90%) yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah lembaga yang bekerja Sama dengan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU). 	<p>Pencapaian Realisasi Anggaran Operasional di tahun 2019 sebesar 98%. Capaian ini melebihi capaian rata-rata nasional sebesar 92%. Capaian ini masuk dalam kategori memuaskan.</p> <p>Rincian pencapaian tiap indikator kinerja memuaskan, dengan indikator kinerja memuaskan (rata-rata diatas 95%):</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah laporan pelaksanaan promosi dan sosialisasi. Jumlah laporan keuangan kinerja PPDPP. Jumlah dokumen pemeliharaan database dan teknologi informasi yang terintegrasi. Jumlah layanan perkantoran. <p>Rincian pencapaian indikator kinerja dengan nilai pencapaian tidak memuaskan ($\leq 70\%$) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen perencanaan anggaran Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU). Jumlah dokumen legal dan bantuan hukum. Jumlah laporan keuangan kinerja PPDPP. Jumlah verifikasi permohonan pencairan dana dari LJK. Jumlah dokumen publikasi kegiatan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU). Jumlah dokumen BMN. Jumlah dokumen evaluasi kinerja. Layanan Internal. 	<p>Pada bulan Oktober 2019 telah dilakukan penyesuaian besaran pemanfaatan dana yang bersumber dari pengembalian pokok, yaitu yang semula sebesar Rp 1,9 triliun menjadi Rp2,4 triliun. Dengan demikian plafon anggaran FLPP tahun 2019 adalah semula sebesar Rp 7,6 triliun dari sebelumnya menjadi 7,1 triliun dengan adanya tambahan pemanfaatan dana pengembalian pokok, maka target penyaluran KPR Sejahtera FLPP yang semula 68.858 unit menjadi 73.858 unit.</p>	
		<p>Pencapaian Kinerja Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok Tahun 2019 adalah sangat memuaskan dengan nilai 105.63%.</p>	<p>Pencapaian Realisasi Anggaran Dana Investasi di tahun 2019 adalah memuaskan dengan nilai 99.07.</p>		

2.	2018.	<p>Rata rata pencapaian Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan di tahun 2018 adalah sangat memuaskan dengan nilai 104.04%.</p> <p>Rincian pencapaian tiap indikator kinerja termasuk kategori memuaskan ($\geq 90\%$), tetapi ada satu indikator kinerja memiliki nilai pencapaian kurang memuaskan</p> <p>(70% - 90%) yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah laporan pelaksanaan promosi dan sosialisasi Jumlah Lembaga LJK yang bekerjasama dengan Pusat Pengelola Dana Pembiayaan. <p>Sedangkan pencapaian yang lebih dari 100% yaitu kegiatan Jumlah rekonsiliasi dengan LJK sampai dengan 220%.</p>	<p>Rata rata pencapaian Realisasi Anggaran Operasional di tahun 2018 adalah termasuk memuaskan dengan nilai 90.53%.</p> <p>Rincian pencapaian tiap indikator kinerja memuaskan, tetapi ada satu indikator kinerja dengan nilai pencapaian tidak memuaskan ($\leq 70\%$) yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen Legal dan Bantuan Hukum. <p>Indikator kinerja dengan nilai pencapaian kurang memuaskan (70% - 90%) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Rekonsiliasi dengan LJK. Jumlah Laporan Keuangan. Jumlah Verifikasi Permohonan Pencairan Dana dari LJK Pelaksana. Jumlah Laporan Pemeliharaan Data Base dan Teknologi Informasi yang Terintegrasi. Jumlah Layanan Pengelolaan Data dan Komunikasi. <p>Pencapaian Realisasi Anggaran Dana Investasi di tahun 2018 adalah memuaskan dengan nilai 97.29.</p>	<p>Penyaluran bantuan pembiayaan perumahan tahun 2018 berdasarkan jumlah unit rumah mulai meningkat pada Oktober sampai dengan Desember. Hal ini disebabkan karena pihak pengembang sudah dapat melengkapi dokumen yang menjamin kualitas rumah yang disalurkan, adanya keikutsertaan bank BTN, dan selesainya regulasi perubahan porsi 90:10 menjadi 75:25. Disamping itu juga dilakukan evaluasi terhadap bank pelaksana yang tidak dapat memenuhi target penyaluran sehingga kuota penyaluran dapat segera dialihkan kepada bank pelaksana yang memiliki kinerja penyaluran yang lebih baik.</p>	
3.	2017.	<p>Rata rata pencapaian Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan di tahun 2017 adalah memuaskan dengan nilai adalah 97,29 %.</p> <p>Rincian pencapaian tiap indikator kinerja dominan termasuk kategori memuaskan ($\geq 90\%$), tetapi ada satu indikator kinerja dengan nilai pencapaian yang termasuk kategori tidak memuaskan ($\leq 70\%$) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Verifikasi Permohonan Pencairan Dana dari LJK Pelaksana. <p>Pencapaian Kinerja Pengelolaan Dana Bergulir dan</p>	<p>Rata rata pencapaian Realisasi Anggaran Operasional di tahun 2017 adalah kurang memuaskan dengan nilai 87.84%.</p> <p>Rincian pencapaian tiap indikator kinerja memuaskan, tetapi ada dua indikator kinerja dengan nilai pencapaian tidak memuaskan ($\leq 70\%$) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Verifikasi Permohonan Pencairan Dana dari LJK Pelaksana Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan <p>Dan indikator kinerja dengan nilai pencapaian kurang memuaskan (70% - 90%) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran 	<p>Tidak tercapainya target FLPP pada tahun 2017 disebabkan karena penerbitan DIPA BUN 999.03 baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan pencairan dari Komisi XI DPR RI pada tanggal 4 Oktober 2017, sedangkan target penyaluran dana FLPP untuk 40.000 unit disusun berdasarkan komitmen dan target bank pelaksana non BTN pada awal tahun 2017 untuk periode penyaluran dana selama 1 (satu) tahun. Karena Revisi DIPA BUN BA 999.03 untuk dana bergulir FLPP baru diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 2017, maka PPDPP hanya memiliki waktu</p>	

		<p>Pengembalian Pokok Tahun 2017 adalah tidak memuaskan dengan nilai 59.4%.</p>	<p>Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Rekonsiliasi dengan LJK. • Jumlah Laporan Keuangan. • Jumlah Laporan Pemeliharaan Data Base dan Teknologi Informasi yang Terintegrasi. • Jumlah Laporan Pemenuhan SDM yang Berkualitas. • Jumlah Layanan Pengelolaan Data dan Komunikasi. • Biaya Gaji dan Tunjangan. <p>Pencapaian Realisasi Anggaran Dana Investasi di tahun 2017 adalah tidak memuaskan dengan nilai 60.2%.</p>	<p>kurang dari 3 (tiga) bulan untuk menyalurkan dana tersebut.</p>	
--	--	---	---	--	--

4.	2016.	<p>Rata rata pencapaian Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan di tahun 2016 adalah kurang memuaskan dengan nilai adalah 95.06%.</p> <p>Rincian pencapaian tiap indikator kinerja dominan termasuk kategori memuaskan ($\geq 90\%$), tetapi ada beberapa indikator kinerja dengan nilai pencapaian yang termasuk kategori tidak memuaskan ($\leq 70\%$) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen Legal dan Bantuan Hukum. Jumlah Lembaga LJK yang bekerjasama dengan Pusat Pengelola Dana Pembiayaan. Jumlah dokumen publikasi kegiatan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU). <p>Pencapaian Kinerja Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok Tahun 2016 adalah sangat memuaskan dengan nilai 118.8% (melebihi target)</p>	<p>Rata rata pencapaian Realisasi Anggaran Operasional di tahun 2016 adalah kurang memuaskan dengan nilai 86.39%.</p> <p>Rincian pencapaian tiap indikator kinerja memuaskan, tetapi ada satu indikator kinerja dengan nilai pencapaian tidak memuaskan ($\leq 70\%$) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Verifikasi Permohonan Pencairan Dana dari LJK Pelaksana. <p>Dan indikator kinerja dengan nilai pencapaian kurang memuaskan (70% - 90%) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen Legal dan Bantuan Hukum Jumlah Lembaga LJK yang bekerjasama dengan Pusat Pengelola Dana Pembiayaan Jumlah Laporan Pemeliharaan Data Base dan Teknologi Informasi yang Terintegrasi Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Jumlah Laporan BMN Jumlah Layanan Perkantoran <p>Pencapaian Realisasi Anggaran Dana Investasi di tahun 2016 adalah sangat memuaskan dengan nilai 108.31% (melebihi target)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pencairan dana FLPP kepada bank pelaksana tahun 2016, DIPA dana bergulir FLPP baru ditetapkan pada tanggal 29 Juni 2016. Beberapa bank pelaksana terlambat menyerahkan MoU (Kesepakatan Bersama) antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan bank pelaksana sehingga penandatanganan PKO antara PPDPP dengan bank pelaksana baru dapat dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2016. 	
5.	2015.	<p>Rata rata pencapaian Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan di tahun 2015 adalah memuaskan dengan nilai 90.88%.</p> <p>Rincian pencapaian tiap indikator kinerja dominan termasuk kategori memuaskan ($\geq 90\%$), tetapi ada beberapa indikator kinerja dengan nilai pencapaian kurang memuaskan (70% - 90%) adalah:</p>	<p>Rata rata pencapaian Realisasi Anggaran Operasional di tahun 2015 adalah tidak memuaskan dengan nilai 62.5%.</p> <p>Rincian pencapaian tiap indikator kinerja termasuk kategori tidak memuaskan ($\leq 70\%$) memuaskan, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen perencanaan anggaran Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU). Jumlah dokumen legal dan bantuan hukum. Jumlah lembaga yang 		

	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan. Jumlah Dokumen Legal dan Bantuan Hukum. Jumlah Lembaga LJK yang bekerjasama dengan Pusat Pengelola Dana Pembiayaan. Jumlah Laporan Keuangan. <p>Indikator kinerja yang termasuk kategori tidak memuaskan ($\leq 70\%$) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Pemeliharaan Data Base dan Teknologi Informasi yang Terintegrasi Jumlah Laporan Publikasi Kegiatan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan <p>Pencapaian Kinerja Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok Tahun 2015 adalah memuaskan dengan nilai 131.7% (melebihi target)</p>	<p>bekerja Sama dengan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU).</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah rekonsiliasi dengan LJK. Jumlah laporan keuangan kinerja PPDPP. Jumlah dokumen pemeliharaan database dan teknologi informasi yang terintegrasi. Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan. Jumlah dokumen pemenuhan SDM yang berkualitas. Jumlah dokumen BMN. <p>tetapi ada dua indikator kinerja dengan nilai pencapaian kurang memuaskan (70% - 90%) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi . Jumlah Layanan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran. <p>Pencapaian Realisasi Anggaran Dana Investasi di tahun 2015 adalah memuaskan dengan nilai 118.6% (melebihi target).</p>		
--	--	--	--	--

BAB 5

P E N U T U P.

Laporan Kinerja BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Tahun 2019 disusun sebagai salah satu dokumen pertanggungjawaban di akhir tahun anggaran sehingga tujuan penyusunan laporan kinerja diharapkan mencerminkan atas kinerja BLU PPDPP di Tahun 2019.

Berbagai upaya yang ditempuh adalah dalam rangka mewujudkan rencana kinerja yang telah ditetapkan guna mewujudkan target pencapaian yang diamanatkan dan menjadi tugas serta tanggung jawab BLU PPDPP dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Rencana Strategis Bisnis Kementerian Pekerjaan Umum dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU PPDPP merupakan rencana kerja dalam rentang waktu lima tahunan telah diimplementasikan pada rencana kerja tahunan dan dikemas dalam kontrak kinerja. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebagai upaya mewujudkan visi dan misi unit kerja BLU PPDPP dalam rangka mendukung penyaluran pembiayaan perumahan dalam hal ini adalah kredit kepemilikan rumah Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (KPR FLPP) dengan capaian kinerja penyaluran diatas 100%. Namun demikian, cukup banyak pekerjaan internal yang harus dibenahi oleh PPDPP terkait dengan penataan kelembagaan jika PPDPP tidak lagi menyalurkan FLPP atau sebagai FLPP, penataan sumber daya manusia agar tercipta *the right man and the right place*, proses bisnis yang terintergrasi sehingga timbul sinergi diantara unit-unit kerja dalam tubuh PPDPP. Sementara itu dari sisi pelaporan kinerja PPDPP harus meningkatkan konsolidasi dalam hal penyusunan laporan melalui pelaporan bulan dan triwulanan dalam rangka inventaris dan validasi pelaporan kinerja melalui penyusunan pelaporan berkala untuk memudahkan validasi data laporan kinerja tahunan.

Dengan demikian, optimalisasi kegiatan dalam rencana kerja dapat menjadi daya ungkit pencapaian kinerja penyaluran dan pengelolaan dana untuk memberikan akses kepada masyarakat agar memiliki rumah yang layak huni melalui KPR Sejahtera FLPP dan upaya memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan serta peningkatan kualitas rumah MBR.

Akhir kata, laporan kinerja ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan di tahun-tahun mendatang.



BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Sabaruddin**
Jabatan : **Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : **Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Desember 2019
Pihak Pertama


ARIEF SABARUDDIN

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
DUKUNGAN PENYALURAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN			
1	Terselenggaranya dukungan penyaluran dan pengelolaan bantuan pembiayaan perumahan	1) Tingkat penyelenggaraan dukungan penyaluran dan pengelolaan bantuan pembiayaan perumahan	100 %

Kegiatan

1. Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan

Anggaran
Rp67.750.000.000,00

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan


EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Desember 2019
Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana
Pembiayaan Perumahan


ARIEF SABARUDDIN



KONTRAK KINERJA
ANTARA
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
DENGAN
DIREKTUR UTAMA PUSAT PENGELOLAAN DANA
PEMBIAYAAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2019



Nomor : PRJ- 213 /PB/2019
Nomor : HK 0102-Sg/221

Dalam rangka mewujudkan tujuan Badan Layanan Umum yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Budi Hartono
Jabatan : Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Marwanto Harjowiryo
Jabatan : Direktur Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

bersepakat bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, ditetapkan kontrak kinerja dengan ketentuan:

1. **PIHAK PERTAMA** menyatakan kesanggupan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Pencapaian Ketepatan Sasaran Penyaluran FLPP	Persentase rumah yang dihuni MBR setelah 1 (satu) tahun sejak penandatanganan akad	100%
2.	Penyaluran Dana Kelolaan	Realisasi jumlah dana kelolaan tersalurkan kepada MBR dalam bentuk KPR FLPP dalam unit rumah	68.858 unit
3.	Pendapatan Layanan dan Non Layanan	Realisasi PNBPU BLU dari pendapatan layanan dan pendapatan non layanan	Rp299 miliar
4.	Peningkatan pengelolaan Badan Layanan Umum yang berkesinambungan	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara tepat waktu yang memadai dan sesuai dengan ketentuan	80%
5.	Pengembangan Sistem Informasi BLU	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	100%

2. PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi atas capaian dari target kinerja tersebut.
3. PIHAK KEDUA akan melakukan revaluasi dan evaluasi atas capaian kinerja dan dipergunakan sebagai pertimbangan pemberian remunerasi.

PIHAK KEDUA,



MARWANTO HARJOWIRYONO

Jakarta, 26 Februari 2019

PIHAK PERTAMA,



BUDI HARTONO

LAMPIRAN

KONTRAK KINERJA DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN
KEUANGAN DAN DIREKTUR UTAMA
PUSAT PENGELOLAAN DANA
PEMBIAYAAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2019

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan

1. Persentase rumah yang dihuni MBR setelah 1 (satu) tahun sejak penandatanganan akad

Sasaran Strategis	: Pencapaian Ketepatan Sasaran Penyaluran FLPP						
Indikator Kinerja Utama	: Persentase rumah yang dihuni MBR setelah 1 (satu) tahun sejak penandatanganan akad						
Deskripsi	: Pemantauan pemanfaatan Rumah Sejahtera yang dihuni MBR setelah 1 (satu) tahun sejak penandatanganan akad, merupakan bagian dari jumlah rumah yang perlu dipastikan tingkat huniannya, untuk mengupayakan dan menguji ketepatan penyaluran FLPP.						
Formula	<p style="text-align: center;">Formula IKU:</p> <p style="text-align: center;">Persentase Tingkat Hunian Rumah + Capaian Tambahan</p> <p>Persentase Tingkat Hunian Rumah dihitung dengan formula sebagai berikut:</p> $\frac{(\Sigma \text{ Rumah yang dihuni}) + (\Sigma \text{ Koreksi})}{\Sigma \text{ Target rumah yang akan dipantau}} \times 100 \%$ <ol style="list-style-type: none"> Jumlah Rumah yang Dihuni: adalah rumah yang digunakan dan dihuni oleh MBR penerima FLPP, dengan kriteria penghunian sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk pelaksanaan FLPP. Jumlah Target Rumah yang akan Dipantau: adalah jumlah target unit Rumah Sejahtera yang akan dipantau selama tahun 2019, yaitu sejumlah 49.000 unit rumah, atau 20% dari Realisasi FLPP dalam 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2014 s.d. 2018) Jumlah Koreksi terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> Jumlah rumah yang sedang dalam tahap konfirmasi oleh Bank Pelaksana, dan; Jumlah rumah yang dihentikan pembiayaannya melalui FLPP, atas perintah Bank Pelaksana; sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk pelaksanaan FLPP. <p>Pengukuran Capaian Kinerja terkait Persentase Tingkat Hunian Rumah sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Kategori Persentase Tingkat Hunian Rumah (PTKH)</th><th>Capaian Kinerja (%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PTKH < 100%</td><td>Sesuai % dari target</td></tr> <tr> <td>PTKH = 100%</td><td>100 %</td></tr> </tbody> </table>	Kategori Persentase Tingkat Hunian Rumah (PTKH)	Capaian Kinerja (%)	PTKH < 100%	Sesuai % dari target	PTKH = 100%	100 %
Kategori Persentase Tingkat Hunian Rumah (PTKH)	Capaian Kinerja (%)						
PTKH < 100%	Sesuai % dari target						
PTKH = 100%	100 %						

	Capaian Kinerja Tambahan dapat diberikan, dalam hal terpenuhi indikator sebagai berikut:		
	Uraian	Kriteria	Tambahan Capaian
	BLU PPDPP dapat melengkapi, menetapkan, dan menerapkan SOP:		
	1. Guna memastikan bank pelaksana melaksanakan uji kelayakan/seleksi MBR penerima FLPP sesuai peraturan perundang-undangan; dan bank pelaksana memastikan MBR memenuhi kewajiban sebagai penerima FLPP;	Terealisasi di Smt. I 2019 (s.d. 30 Juni 2019)	10%
	2. Pemberian peringatan dan/atau sanksi terhadap MBR yang tidak mematuhi kewajiban sebagai penerima FLPP;		
	3. Pemberian peringatan dan/atau sanksi bagi bank pelaksana, atas penyaluran FLPP yang tidak tepat sasaran; dengan mempedomani ketentuan dalam peraturan perundang-undang mengenai petunjuk pelaksanaan FLPP.	Terealisasi di Tahun 2019 (s.d. 31 Des 2019)	5%
	BLU PPDPP memberikan peringatan dan/atau sanksi kepada bank pelaksana atas penyaluran FLPP yang tidak tepat sasaran.	Tahun 2019 (s.d. 31 Des 2019)	10%
Tujuan	BLU PPDPP dapat menyajikan informasi hasil pemantauan dan tindak lanjutnya dengan cepat memanfaatkan teknologi informasi bagi para stakeholder	Tahun 2019 (s.d. 31 Des 2019)	10%
	BLU PPDPP telah menerima kembali dari bank pelaksana dana FLPP yang disalurkan sesuai ketentuan peraturan perundangan, dalam hal kelompok sasaran memberikan pernyataan tidak benar atau tidak melaksanakan kewajiban sehingga penyaluran FLPP menjadi tidak tepat sasaran	Tahun 2019 (s.d. 31 Des 2019)	20%
	Capaian maksimal untuk IKU ini adalah 150%.		
	IKU ini bertujuan untuk mendorong BLU PPDPP melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk pelaksanaan FLPP, sehingga dana FLPP yang disalurkan kepada MBR (penerima KPR Sejahtera) dapat tepat sasaran.		
	Persen (%)		
	Take last known value		
Jenis Konsolidasi Periode	Maximize (semakin tinggi capaian semakin baik)		
Polarisasi Indikator Kinerja	Tahunan		
Periode Pelaporan	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Rumah Sejahtera, Laporan Hasil Koreksi, serangkaian SOP terkait pengelolaan FLPP, Hasil Evaluasi Bank Pelaksana, Laporan Keuangan.		
Sumber Data			

2. Realisasi Jumlah Dana Kelolaan Tersalurkan kepada MBR dalam Bentuk KPR FLPP dalam Unit Rumah

Sasaran Strategis	: Penyaluran Dana Kelolaan																								
Indikator Kinerja Utama	: Realisasi dana kelolaan tersalurkan kepada MBR dalam bentuk KPR FLPP dalam unit rumah.																								
Deskripsi	: Realisasi dana kelolaan yang tersalurkan kepada MBR melalui KPR FLPP dalam unit rumah adalah realisasi atas penyaluran FLPP dalam unit rumah, yang dihitung berdasarkan perjanjian kerja sama operasional dengan bank pelaksana dan hasil verifikasi melalui sistem online.																								
Formula	<p>: Formula IKU = jumlah realisasi penyaluran dana kelolaan kepada MBR dengan skema KPR FLPP (satuan: unit rumah).</p> <p>Target penyaluran FLPP dalam unit rumah untuk periode 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019 adalah 68.858 unit rumah.</p> <p>Pengukuran Capaian Kinerja terkait Realisasi Dana Kelolaan (dalam unit rumah) sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kriteria Realisasi Dana Kelolaan (unit rumah)</th> <th>Capaian Kinerja (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 68.858 unit rumah</td> <td>Sesuai % dari target</td> </tr> <tr> <td>= 68.858 unit rumah</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>68.858 unit rumah < realisasi < 69.000 unit rumah</td> <td>110%</td> </tr> <tr> <td>> 69.000 unit rumah</td> <td>120%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Capaian Kinerja Tambahan dapat diberikan, dalam hal terpenuhi indikator sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>Kriteria</th> <th>Tambahan Capaian Kinerja (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">BLU PPDPP dapat menyediakan mekanisme dan melaporkan hasil penerimaan kembali dana kelolaan FLPP, baik yang berasal dari pengembalian pokok rutin (kondisi normal) maupun yang berasal dari pengembalian pokok karena ketidaktepatan sasaran.</td> <td>Teralisasi di Smt. I Tahun 2019 (s.d. 30 Juni 2019)</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Terealisasi di Tahun 2019 (s.d. 31 Desember 2019)</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>BLU PPDPP memberi bukti ketepatan waktu seluruh proses penyaluran dana kelolaan FLPP melalui bank pelaksana sesuai dengan SOP berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (minimal mencapai 90% dari total penyaluran dana kelolaan tahun 2019).</td> <td>sepanjang Tahun 2019</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>BLU PPDPP dapat melaporkan data penyaluran dana dari bank pelaksana kepada debitur, dan data penerimaan pengembalian pokok serta penerimaan tarif layanan dari masing-masing debitur per bulan.</td> <td>sepanjang Tahun 2019</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Capaian maksimal untuk IKU ini adalah 150%.</p>	Kriteria Realisasi Dana Kelolaan (unit rumah)	Capaian Kinerja (%)	< 68.858 unit rumah	Sesuai % dari target	= 68.858 unit rumah	100 %	68.858 unit rumah < realisasi < 69.000 unit rumah	110%	> 69.000 unit rumah	120%	Uraian	Kriteria	Tambahan Capaian Kinerja (%)	BLU PPDPP dapat menyediakan mekanisme dan melaporkan hasil penerimaan kembali dana kelolaan FLPP, baik yang berasal dari pengembalian pokok rutin (kondisi normal) maupun yang berasal dari pengembalian pokok karena ketidaktepatan sasaran.	Teralisasi di Smt. I Tahun 2019 (s.d. 30 Juni 2019)	10%	Terealisasi di Tahun 2019 (s.d. 31 Desember 2019)	5%	BLU PPDPP memberi bukti ketepatan waktu seluruh proses penyaluran dana kelolaan FLPP melalui bank pelaksana sesuai dengan SOP berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (minimal mencapai 90% dari total penyaluran dana kelolaan tahun 2019).	sepanjang Tahun 2019	10%	BLU PPDPP dapat melaporkan data penyaluran dana dari bank pelaksana kepada debitur, dan data penerimaan pengembalian pokok serta penerimaan tarif layanan dari masing-masing debitur per bulan.	sepanjang Tahun 2019	10%
Kriteria Realisasi Dana Kelolaan (unit rumah)	Capaian Kinerja (%)																								
< 68.858 unit rumah	Sesuai % dari target																								
= 68.858 unit rumah	100 %																								
68.858 unit rumah < realisasi < 69.000 unit rumah	110%																								
> 69.000 unit rumah	120%																								
Uraian	Kriteria	Tambahan Capaian Kinerja (%)																							
BLU PPDPP dapat menyediakan mekanisme dan melaporkan hasil penerimaan kembali dana kelolaan FLPP, baik yang berasal dari pengembalian pokok rutin (kondisi normal) maupun yang berasal dari pengembalian pokok karena ketidaktepatan sasaran.	Teralisasi di Smt. I Tahun 2019 (s.d. 30 Juni 2019)	10%																							
	Terealisasi di Tahun 2019 (s.d. 31 Desember 2019)	5%																							
BLU PPDPP memberi bukti ketepatan waktu seluruh proses penyaluran dana kelolaan FLPP melalui bank pelaksana sesuai dengan SOP berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (minimal mencapai 90% dari total penyaluran dana kelolaan tahun 2019).	sepanjang Tahun 2019	10%																							
BLU PPDPP dapat melaporkan data penyaluran dana dari bank pelaksana kepada debitur, dan data penerimaan pengembalian pokok serta penerimaan tarif layanan dari masing-masing debitur per bulan.	sepanjang Tahun 2019	10%																							

A

Tujuan	:	IKU ini bertujuan untuk mendorong BLU PPDPP dalam meningkatkan cakupan penerapan program FLPP sesuai dengan amanat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat merealisasikan penyaluran dana kelolaan FLPP kepada MBR dapat terlaksana dengan tepat waktu sesuai dengan SOP dan Standar Pelayanan Minimum.
Satuan Pengukuran	:	Unit
Jenis Konsolidasi Periode	:	<i>Take Last Known Value</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	:	<i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Sumber Data	:	Data realisasi jumlah unit rumah yang dibiayai melalui skema KPR FLPP, Laporan Penggunaan Dana Kelolaan Bulanan, Laporan Kinerja Tahunan

3. Realisasi PNBP BLU dari Pendapatan Layanan dan Pendapatan Non-Layanan

Sasaran Strategis	:	Realisasi Pendapatan layanan dan non layanan												
Indikator Kinerja Utama	:	Realisasi PNBP BLU dari pendapatan layanan dan pendapatan non-layanan												
Deskripsi	:	<p>Realisasi PNBP BLU PPDPP dari pendapatan layanan adalah PNBP yang diperoleh sebagai imbal jasa atas dana yang disalurkan melalui bank pelaksana sebagai mitra penyalur dana bergulir FLPP kepada <i>end user</i> (MBR), sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tarif layanan.</p> <p>Realisasi PNBP BLU PPDPP dari pendapatan non-layanan adalah PNBP yang diperoleh dari pengelolaan dana yang menganggur (<i>idle cash/fund</i>), baik yang bersumber dari dana kelolaan maupun dari surplus kas.</p> <p>Sebagai pengelola dana, BLU PPDPP memiliki tugas utama menyalurkan dan mengelola dana bergulir pembiayaan perumahan, dan memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk mengoptimalkan pendapatan.</p>												
Formula	:	<p>Formula IKU:</p> $\text{Realisasi PNBP} = \text{Realisasi Pendapatan Layanan} + \text{Realisasi Pendapatan NonLayanan}$ <p>Realisasi PNBP ini merupakan PNBP yang diterima dan dikelola oleh BLU PPDPP untuk periode 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019, yang kemudian disahkan kepada Kuasa BUN.</p> <table><tr><td>Target Realisasi PNBP</td><td>:</td><td>Rp299 Milyar</td><td></td></tr><tr><td>Target Pendapatan Layanan</td><td>:</td><td>Rp157 Milyar</td><td>Bobot 70%</td></tr><tr><td>Target Pendapatan Non Layanan</td><td>:</td><td>Rp142 Milyar</td><td>Bobot 30%</td></tr></table>	Target Realisasi PNBP	:	Rp299 Milyar		Target Pendapatan Layanan	:	Rp157 Milyar	Bobot 70%	Target Pendapatan Non Layanan	:	Rp142 Milyar	Bobot 30%
Target Realisasi PNBP	:	Rp299 Milyar												
Target Pendapatan Layanan	:	Rp157 Milyar	Bobot 70%											
Target Pendapatan Non Layanan	:	Rp142 Milyar	Bobot 30%											

	Catatan: maksimal capaian kinerja untuk IKU ini adalah 150%
Tujuan	: IKU ini bertujuan mendorong BLU PPDP dalam melakukan langkah-langkah dalam optimalisasi PNB, baik dari layanan maupun non layanan. Bobot realisasi PNB diberikan lebih tinggi untuk pendapatan layanan, untuk memotivasi BLU PPDP dalam melaksanakan layanan dana bergulir, dan meminimalkan saldo kas yang menganggur.
Satuan Pengukuran	: Rupiah
Jenis Konsolidasi Periode	: <i>Take last known value</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	: <i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	: Tahunan
Sumber Data	: Laporan Keuangan Tahunan, Aplikasi SPAN, dan Aplikasi OM SPAN

4. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara Tepat Waktu yang Memadai sesuai dengan Ketentuan

Sasaran Strategis	: Peningkatan pengelolaan Badan Layanan Umum yang berkesinambungan
Indikator Kinerja Utama	: Persentase penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara Tepat Waktu yang Memadai dan sesuai dengan ketentuan
Deskripsi	: Penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi (monev) dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU) adalah tindak lanjut yang dilaksanakan oleh BLU atas saran dan masukan yang disampaikan dalam Laporan Monev Direktorat PPKBLU, berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Formula	: Perhitungan capaian kinerja penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari Direktorat PPKBLU, dihitung sebagai berikut: <p style="text-align: center;">Formula Capaian IKU (%):</p> $= \left[\frac{\text{Capaian Tindak Lanjut dalam persen}}{\text{Target Tindak Lanjut dalam persen}} \times 100\% \right] + \text{Tambahan Capaian}$ <p>Rekomendasi Substantif adalah rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh BLU dengan berkoordinasi dengan pihak lain, dan/atau menyusun atau mengubah peraturan intern BLU, dan/atau menyusun atau mengubah <i>Standard Operating Procedures</i>.</p> <p>Rekomendasi Administratif adalah rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh BLU dengan koreksi dokumen dan/atau pelaksanaan kegiatan operasional yang tidak mempengaruhi proses bisnis dan layanan BLU.</p>

A

Penilaian ketercapaian kinerja atas Realisasi PNB BLU dihitung dengan panduan sebagai berikut:

Pendapatan Layanan (PL)			
Kategori Realisasi	Capaian Awal	Bobot	Capaian Kinerja
< Rp157 Miliar	Sesuai % dari target	70%	(Sesuai % dari target) x 70%
= Rp157 Miliar	100%	70%	70%
Rp157 Miliar < PL ≤ Rp165 Miliar	110%	77%	77%
> Rp165 Miliar	120%	84%	84%

Pendapatan Non-Layanan			
Kategori Realisasi	Capaian Awal	Bobot	Capaian Kinerja
< Rp 142 Miliar	Sesuai % dari target	30%	(Sesuai % dari target) x 30%
= Rp142 Miliar	100%	30%	30%
Rp142 Miliar < PNL ≤ Rp150 Miliar	110%	30%	33%
PNL > Rp150 Miliar	120%	30%	36%

Tambahan atas pengukuran capaian kinerja dapat diberikan dengan kriteria sebagai berikut:

Kriteria Tambahan	Capaian Tambahan (%)
a. Seluruh nomenklatur dan tata kelola rekening yang dikelola oleh BLU PPDPP telah sesuai dengan PMK Nomor 182/PMK.05/2017.	5%
b. BLU PPDPP telah mengupayakan saldo minimal pada Rekening Operasional Pengeluaran BLU, dan telah melakukan pelimpahan kas dari Rekening Operasional Penerimaan BLU ke Rekening Operasional Pengeluaran BLU sesuai dengan perencanaan kas yang akurat.	5%
c. BLU PPDPP telah menyusun dan menerapkan kebijakan investasi jangka pendek yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya PMK Nomor 82/PMK.05/2018.	5%
d. BLU PPDPP telah menyusun rencana investasi jangka pendek tahunan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya PMK Nomor 82/PMK.05/2018.	5%
e. SOP pengelolaan kas dan rekening pada BLU PPDPP telah lengkap disusun dan diterapkan dengan pemisahan kewenangan untuk mewujudkan prinsip <i>check and balance</i> , dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan BLU.	5%
f. Pengelola investasi pada BLU PPDPP telah melaksanakan analisis terhadap risiko dan kajian yang memadai dan terdokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya PMK Nomor 82/PMK.05/2018, serta tersedia setiap saat diperlukan.	5%

Dalam hal tindak lanjut yang disampaikan belum memadai dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan, maka tindak lanjut tersebut belum dapat dihitung sebagai capaian.

Pengukuran nilai atas ketepatan waktu penyelesaian rekomendasi yang memadai dan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis Rekomendasi diklasifikasikan menjadi Substantif (S) dan Administratif (A).
2. Nilai diklasifikasikan menjadi 100 (Tepat Waktu), 70 (Terlambat), dan 0 (Belum Ditindaklanjuti).
3. Bobot Tindak Lanjut diklasifikasikan menjadi 75% (Substantif) dan 25% (Administratif).
4. Target Tindak Lanjut adalah 80 persen (%).
5. Formula untuk pengukuran Capaian Tindak Lanjut (CTL) sebagai berikut:

$$CTL = \frac{\text{jumlah nilai substantif}}{\sum \text{rekomendasi substantif} \times 100} \times \text{bobot 75\%} + \frac{\text{jumlah nilai administratif}}{\sum \text{rekomendasi administratif} \times 100} \times \text{bobot 25\%}$$

Simulasi pengukuran capaian tindak lanjut sebagai berikut:

Nomor Rekomendasi	Jenis Rekomendasi*	Deadline Tindak Lanjut	Tgl. Laporan Tindak Lanjut	Keterangan	Nilai **	Bobot	Capaian Tindak Lanjut (%)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1	S	31 Mar	28 Mar	Tepat Waktu	100	75%	51%
2	S	30 Jun	15 Jun	Tepat Waktu	100		
3	S	31 Jul	-	Belum	0		
4	S	31 Okt	1 Nov	Terlambat	70		
5	S	30 Nov	31 Des	Terlambat	70		
6	A	30 Apr	30 Apr	Tepat Waktu	100	25%	14,17%
7	A	31 Agt	10 Des	Terlambat	70		
8	A	30 Nov	-	Belum	0		
Jumlah					510	100%	64,17%

$$\text{Capaian IKU} = (64,17\%/80\%) \times 100\% = 80,21\%$$

Catatan:

Dalam hal seluruh tindak lanjut yang memadai dan sesuai dengan ketentuan telah diselesaikan di tahun 2019 mendahului batas waktu (*deadline*) tindak lanjut untuk tiap rekomendasi, maka dapat diberikan tambahan capaian IKU sebesar 25% sehingga maksimal capaian IKU ini adalah 150%.

Tujuan	: IKU ini bertujuan untuk meningkatkan responsivitas BLU dan komitmen dalam perbaikan yang dilaksanakan terus menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, guna menunjang pelayanan BLU yang berkesinambungan dan peningkatan kinerja BLU.
Satuan Pengukuran	: Persen (%)
Jenis Konsolidasi Periode	: <i>Take Last Known Value</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	: <i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	: Tahunan
Sumber Data	: Surat dan/atau laporan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi, serta isian tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi di BIOS.

5. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU

Sasaran Strategis	: Pengembangan Sistem Informasi BLU dan Pemanfaatan Teknologi secara Optimal								
Indikator Kinerja Utama	: Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU								
Deskripsi	: Modernisasi Pengelolaan BLU dalam tahun 2019 adalah upaya untuk menerapkan teknologi informasi dalam pengembangan dan peningkatan kualitas layanan dan kinerja, yang antara lain mencakup pemanfaatan BIOS, penggunaan <i>Office Automation</i> (OA) atau aplikasi persuratan dan pemrosesan yang setara, pengembangan aplikasi untuk meningkatkan layanan utama BLU, dan pengintegrasian basis data (<i>database</i>) data bergulir dengan Sistem Informasi Kredit Program; selama kurun waktu 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019.								
Formula	<p>: Penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU dalam tahun 2019 dihitung berdasarkan kelengkapan dan kecepatan atas tahapan modernisasi.</p> <p>Formula :</p> <p>Capaian KPI (%) = Capaian Kelengkapan Tahapan + Capaian Tambahan</p> <p>Capaian Kelengkapan Tahapan diukur dengan panduan sebagai berikut</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Variabel</th><th>Capaian Kinerja</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BLU PPDPP telah mengelola data profil, layanan, dan keuangan pada Aplikasi BIOS dengan lengkap dan <i>up-to-date</i>.</td><td>10%</td></tr> <tr> <td>BLU PPDPP telah menggunakan modul-modul pada BIOS dilaksanakan secara maksimal (antara lain mencakup tanggapan/tindak lanjut atas hasil monev, modul tarif, modul remunerasi, modul RSB dan RBA, pengisian data keuangan (pendapatan, belanja, CaLK), modul SOP, dan modul dokumentasi).</td><td>20%</td></tr> <tr> <td>BLU PPDPP telah menyediakan <i>website</i> yang representatif, informatif, dan <i>up-to-date</i>.</td><td>5%</td></tr> </tbody> </table>	Variabel	Capaian Kinerja	BLU PPDPP telah mengelola data profil, layanan, dan keuangan pada Aplikasi BIOS dengan lengkap dan <i>up-to-date</i> .	10%	BLU PPDPP telah menggunakan modul-modul pada BIOS dilaksanakan secara maksimal (antara lain mencakup tanggapan/tindak lanjut atas hasil monev, modul tarif, modul remunerasi, modul RSB dan RBA, pengisian data keuangan (pendapatan, belanja, CaLK), modul SOP, dan modul dokumentasi).	20%	BLU PPDPP telah menyediakan <i>website</i> yang representatif, informatif, dan <i>up-to-date</i> .	5%
Variabel	Capaian Kinerja								
BLU PPDPP telah mengelola data profil, layanan, dan keuangan pada Aplikasi BIOS dengan lengkap dan <i>up-to-date</i> .	10%								
BLU PPDPP telah menggunakan modul-modul pada BIOS dilaksanakan secara maksimal (antara lain mencakup tanggapan/tindak lanjut atas hasil monev, modul tarif, modul remunerasi, modul RSB dan RBA, pengisian data keuangan (pendapatan, belanja, CaLK), modul SOP, dan modul dokumentasi).	20%								
BLU PPDPP telah menyediakan <i>website</i> yang representatif, informatif, dan <i>up-to-date</i> .	5%								

Variabel		Capaian Kinerja
BLU PPDPP telah menyediakan yang terhubung dengan Kementerian Keuangan, dan menerapkan <i>webservices</i> untuk transfer data ke Kementerian Keuangan.		10%
BLU PPDPP telah menyediakan <i>dashboard</i> untuk kebutuhan manajerial yang dapat diakses oleh Direktorat PPKBLU.		5%
BLU PPDPP telah mengintegrasikan database penerima dana bergulir dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).		20%
BLU PPDPP telah menerapkan <i>Office Automation</i> atau aplikasi pemrosesan pekerjaan yang setara.		10%
BLU PPDPP memiliki sistem aplikasi pengelolaan layanan dan pengelolaan keuangan yang terintegrasi.		15%
BLU PPDPP telah mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas perbankan yang menerapkan teknologi (antara lain CMS dan/atau penggunaan <i>virtual account</i>).		5%
Capaian Tambahan dapat diberikan dengan indikator pengukuran sebagai berikut:		
Variabel		Capaian Kinerja
BLU PPDPP telah menyusun dan menerapkan sistem untuk pelaksanaan rekonsiliasi data dengan perbankan dengan menggunakan teknologi informasi (aplikasi) yang tersedia secara <i>real time online</i> .		10%
BLU PPDPP telah menyusun dan menerapkan sistem yang dapat memastikan ketepatan sasaran penyaluran dana FLPP kepada MBR.		10%
BLU PPDPP telah menyusun dan menerapkan sistem yang dapat memantau dana FLPP sampai dengan <i>end-user</i> , yang tersedia secara <i>real time online</i> .		10%
Ketiga variabel tambahan dapat diselesaikan dan mulai diterapkan pada Semester I Tahun 2019 (s.d. 30 Juni 2019).		10%
Ketiga variabel tambahan dapat diselesaikan dan mulai diterapkan pada Tahun 2019 (s.d. 31 Desember 2019).		10%
Catatan: maksimal capaian kinerja untuk IKU ini adalah 150%		
Tujuan	:	IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat modernisasi pengelolaan BLU dalam mendukung peningkatan layanan, akuntabilitas dan akurasi manajemen dalam pengambilan keputusan.
Satuan Pengukuran	:	Persen (%)
Jenis Konsolidasi Periode	:	<i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	:	<i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	:	Semesteran
Sumber Data	:	Data primer pengembangan Sistem Informasi BLU, dan data primer sebagai pembandingan/penguji validitas data yang terekam pada sistem.

A



website
www.ppdpp.id

call center
0-800-10-77377



Jl. Palatehan I No. 27 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12110, Tlp. 021-27510964 Fax. 021-7220050



BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Sabaruddin**
Jabatan : **Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : **Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Desember 2019
Pihak Pertama

ARIEF SABARUDDIN

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
PENYALURAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN			
1	Terselenggaranya dukungan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan	1) Tingkat penyelenggaraan dukungan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan	100 %

Kegiatan

1. BA 999.03
2. Proyeksi pengembalian pokok

Anggaran
Rp5.200.000.000.000,00
Rp2.400.000.000.000,00
Rp7.600.000.000.000,00

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan


EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Desember 2019
Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana
Pembiayaan Perumahan


ARIEF SABARUDDIN